

**KEPUTERIAN REPUBLIK INDONESIA  
DI KOTA PADANG DAN SEKITARNYA PADA MASA REVOLUSI  
(1945-1947)**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata 1  
(S1) pada program studi Pendidikan Sejarah*



Oleh:

**GUSTI ARMAN**

73612/ 2006

**PENDIDIKAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2011**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Judul** : Keputerian Republik Indonesia di Kota Padang dan sekitarnya pada masa revolusi (1945-1947)  
**Nama** : Gusti Arman  
**NIM** : 73612  
**Jurusan** : Pendidikan Sejarah  
**Fakultas** : Ilmu-ilmu Sosial

**Padang, Februari 2011**

**Disetujui oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**

**Drs. Etmi Hardi, M.Hum**

**NIP. 196102181984032001**

**NIP. 196703041993031003**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Sejarah**

**Hendra Naldi, SS, M.Hum**

**NIP. 196909301996031001**



**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi  
Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Negeri Padang**

**Keputerian Republik Indonesia  
di Kota Padang dan sekitarnya pada masa revolusi (1945-1947)**

Nama : Gusti Arman  
BP/NIM : 2006/ 73612  
Jurusan : Sejarah  
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, Februari 2011

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
Pembimbing I	: Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum	.....
Pembimbing II	: Drs. Etmi Hardi, M. Hum	.....
Penguji	: Prof. Dr. Mestika Zed, M.A	.....
	: Hendra Naldi, S.S, M.Hum	.....
	: Abdul Salam, S.Ag. M.Hum	.....

## Abstrak

**Gusti Arman. 2006/73612: Keputerian Republik Indonesia di Kota Padang dan sekitarnya pada masa Revolusi (1945 - 1947). Skripsi Jurusan Sejarah. Fakultas Ilmu-ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang. 2011**

Skripsi ini merupakan kajian tentang sejarah perempuan, khususnya dalam perjuangan kemerdekaan di Kota Padang dan sekitarnya dengan melihat kontribusi yang diberikan oleh perempuan. Penelitian ini lebih menfokuskan tentang: Keputerian Republik Indonesia (KRI) sebagai salah satu organisasi perempuan yang ada di Kota Padang, karena untuk mengetahui bagaimana peranan yang telah diberikan perempuan dalam perjuangan, maka dapat dilihat dari berbagai kelompok sosial yang ada termasuk aktifitas individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh manakah kaum perempuan memberi andil dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan khususnya di Kota Padang dan sekitarnya.

Guna mendapatkan tujuan tersebut, maka skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah, yang dibagi dalam empat tahap yakni: Tahap pertama adalah Heuristik yaitu mengumpulkan dan menghimpun semua data yang relevan dengan topik penelitian ini baik itu data primer dan sekunder. Tahap kedua, setelah data dikumpulkan dilakukan Kritik sumber yang merupakan tahap pengolahan data, tahap ini dilakukan dengan kritik eksternal dan internal. Tahap ketiga, yaitu: Analisis data atau interpretasi data, yaitu menghubungkan data yang perlu, untuk dijadikan sumber penting dalam penelitian baik yang diperlihatkan dilapangan maupun studi kepustakaan. Tahap terakhir, yaitu: Penulisan Sejarah yang sesuai dengan kaidah ilmu sejarah.

Pada hasil penelitian ini ditemui bahwa dalam perjuangan kemerdekaan di Kota Padang dan sekitarnya, kaum perempuan telah memberikan andil penting dalam perjuangan. Hal ini dapat dilihat dengan lahirnya organisasi KRI sejak awal kemerdekaan, atas inisiatif kaum perempuan untuk turut andil dalam perjuangan. Adapun tujuan dari organisasi KRI adalah melatih peteri-puteri Indonesia agar tumbuh kesadaran bernegara. Kedudukan KRI ini berada di bawah naungan TKR. Selain bertugas digaris belakang dan kepalangmerahan, anggota dari organisasi ini juga aktif dalam membantu tentara pejuang di garis depan seperti menjadi mata-mata atau kurir. Dalam perkembangannya, KRI nanti bergerak di dua tempat yaitu di Kota Padang dan Padang luar kota, akibat semakin panasnya situasi dalam kota saat itu. Setelah Belanda melakukan agresi militer pertamanya, markas dan anggota KRI akhirnya pergi mengungsi ke luar kota dan melanjutkan perjuangan di Bukittinggi, karena Kota Padang saat itu yang sudah dikuasai oleh Belanda.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia serta hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan pada penulis, sehingga telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “*Keputerian Republik Indonesia di Kota Padang dan sekitarnya pada masa Revolusi (1945 - 1947)*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang (UNP).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Sehingga dengan itu pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Siti Fatimah. M.Pd. M.Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Etmi Hardi. M.Hum selaku Pembimbing II, yang penuh perhatian dan kesabaran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Staf Dosen serta karyawan/ karyawanwati Jurusan Sejarah yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Pegawai-pegawai kantor administrasi Veteran CAD-1/27 BABINMINVETCADDAM - I / BUKIT BARISAN, dan kantor Legiun Veteran Padang yang telah membantu penulis dalam pencarian data selama penelitian.
4. Masyarakat Kota Padang yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.
5. Yang tercinta Orang Tua, terima kasih atas dorongan dan semangat baik moril maupun materil serta doa yang diberikan selama ini.

6. Seluruh rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dan semua pihak yang telah ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan, dan petunjuk yang Bapak / Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan ketidak sempurnaan dalam skripsi ini sehingga kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan tulisan ini. Semoga penulisan ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Januari 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
1. Study Relevan .....	9
2. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	18
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KOTA PADANG DAN</b>	
<b>MASYARAKATNYA PADA MASA REVOLUSI</b>	
A. Kota Padang pada masa revolusi fisik .....	20
B. Keadaan Geografis Kota Padang .....	36
C. Kedudukan Perempuan di Minangkabau .....	40
D. Peranan berbagai kelompok sosial dalam perjuangan .....	43

### **BAB III KEPUTERIAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **DI KOTA PADANG DAN PADANG LUAR KOTA .....53**

A. Struktur organisasi KRI di Kota Padang dan sekitarnya .....60

B. Perekrutan anggota KRI.....64

C. Kegiatan dari anggota KRI .....68

1. Dapur Umum .....70

2. Palang Merah Indonesia.....75

3. Kemiliteran .....78

D. Pengungsian KRI keluar Kota (1947).....79

### **BAB IV PENUTUP .....83**

A. Kesimpulan .....83

B. Saran .....84

### **DAFTAR PUSTAKA ..... vii**

### **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABELDAN BAGAN**

1. Luak Padang dan sekitarnya .....	24
2. Luas daerah Kota Padang sebelum perluasan kota .....	39
3. Stuktur kedudukan organisasi KRI .....	57
4. Pola perjuangan Republik di Indonesia di Sumatera Tengah .....	58
5. Struktur organisasi KRI di Kota Padang.....	60
6. Struktur organisasi KRI di Padang luar kota .....	62

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perjuangan yang belum selesai setelah proklamasi kemerdekaan, di mana bangsa ini kembali dituntut untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda dan Sekutu yang datang kembali ke Indonesia, menyebabkan Kota-Kota di seluruh wilayah Indonesia dituntut kembali untuk mempertahankan daerahnya masing-masing. Sumatera Barat merupakan pusat politik yang gigih dalam menentang Belanda dan Sekutunya saat itu<sup>1</sup>, sebagai contoh catatan penting yang ditinggalkan daerah ini antara lain adalah Bukittinggi pada bulan Juli 1947 menjadi Ibu Kota untuk seluruh Sumatera, kemudian setelah agresi Belanda kedua, pada bulan Desember 1948 di Sumatera Barat dibentuk Pemerintahan darurat Republik Indonesia.

Mengingat Kota Padang saat itu adalah pusat pemerintahan Sumatra Barat, dan sudah lama menjadi pusat administrasi Belanda sejak zaman kolonial, maka Padang merupakan batu loncatan pertama bagi Sekutu dan Belanda untuk masuk lebih jauh ke daerah Sumatra Barat ini. Oleh karena itu, sejak semula perhatian dan tenaga para pemimpin keresidenan saat itu terkuras sepenuhnya ke Kota Padang dan sekitarnya<sup>2</sup>, karena gejolak dan irama sejarah yang terjadi di Kota-Kota dan daerah Sumatera Barat pada periode itu dimulai dari Padang dan menjalar hampir ke seluruh Kota<sup>3</sup>. Kemudian situasi di Padang dan sekitarnya semakin panas, di mana-mana terjadi bentrokan antara rakyat yang tergabung dalam berbagai organisasi sosial melawan pihak Sekutu. Padang sekitarnya segera menjadi

---

<sup>1</sup> Kahin R Audrey., 1990., *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*. (Jakarta ; Pustaka Utama Grafiti ). Penerjemah ; Sanggraha Hoerip. Hal 150

<sup>2</sup> Mestika Zed, Emizal Amri, dan Etmi Hardi., 2002., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) di Kota Padang dan sekitarnya*. (Padang.; Yayasan Citra Budaya Indonesia), Hal 96

<sup>3</sup> *Ibid.*, Hal 2

front pertempuran, terpengaruh oleh istilah yang digunakan Sekutu, Padang dan sekitarnya disebut Padang area<sup>4</sup>.

Dalam usaha mempertahankan kemerdekaan, maka tidak akan terlepas dari pejuang-pejuang<sup>5</sup> saat itu, yang terdiri dari semua lapisan element masyarakat. Dalam catatan sejarah, sekarang mereka dikenal sebagai pejuang-pejuang rakyat yang kini dihimpun dalam satu kesatuan yang bernama “pejuang veteran”<sup>6</sup>. Di antara pejuang veteran tersebut, juga terdiri dari perempuan<sup>7</sup>, dan hal ini menarik bagi penulis untuk melihat bagaimana andil pejuang perempuan ini, khususnya dalam perang revolusi<sup>8</sup> kemerdekaan di Kota Padang. Karena seperti yang diketahui, sejarah pejuang dewasa ini sering hanya didominasi oleh kaum laki-laki saja<sup>9</sup>, begitu juga yang penulis nilai dari penulisan sejarah yang ada khususnya di Kota Padang, sedangkan dibalik itu ternyata terdapat srikandi-srikandi yang ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Hal ini pernah mendapat kecaman dari Endriana, seorang praktisi dan pemerhati dunia perempuan. Dalam sebuah wacana *Wanita dan Media* ia menandakan betapa penting menyelidiki kembali historiografi Indonesia untuk menjawab kenapa dan bagaimana perempuan, secara individual maupun kolektif, telah hilang dari sejarah Indonesia.<sup>10</sup>

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat saat itu, yaitu saat terjadinya perang, ternyata berdampak pada perubahan peran dalam masyarakat. Perempuan tidak hanya menggeluti

---

<sup>4</sup> Ahmad Husein dkk. 1991., *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Minangkabau / Riau*. Jilid 1 Jakarta ; BPSIM. Hal 313

<sup>5</sup> Dalam kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pejuang adalah orang yang berjuang. Dalam artian adalah orang yang berjuang secara fisik maupun mental dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan . Purwadaraminta. W.J.S., 1983., *Kamus Bahasa Indonesia*., (Jakarta ; Balai Pustaka)

<sup>6</sup> Pejuang veteran adalah gelar atau label yang diberikan kemudian hari kepada pejuang-pejuang perang. [www.google.com](http://www.google.com) hari rabu tanggal 27 Desember 2009

<sup>7</sup> Wawancara dengan, Bapak Sugiarto (63th) pimpinan kantor administrasi veteran pada hari rabu 28 desember 2009

<sup>8</sup> Menurut Mestika Zed dalam tulisannya *Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) di kota Padang dan sekitarnya*, revolusi adalah perubahan – perubahan cepat, keras, kejam dan bahkan seringkali menelan banyak korban nyawa dan harta benda, yang berlangsung dalam suasana mencekam dan ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi berikutnya.

<sup>9</sup> Rizal, JJ. *Jejak perempuan dalam Historiografi Indonesia*. Dalam Jurnal perempuan, no 52, tahun 2007

<sup>10</sup> *Ibid*

sektor domestik<sup>11</sup> saja, tetapi juga telah memasuki sektor publik<sup>12</sup>. Hal ini dapat dilihat dalam Buku *Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi*, suntingan Irna H.N Hadi Soewito, di mana mereka yang terlibat langsung dalam perang gerilya. Perempuan terlibat dalam berbagai jalur perjuangan, ada yang melalui fungsinya sebagai petugas palang merah, kurir, intel, dan prajurit perempuan yang berjuang bersama kaum pria digaris dapan.

Hal yang demikian juga terjadi di Sumatra Barat, seperti kaum ibu-ibu yang membeli pesawat RI 003 hasil sumbangan harta mereka seharga 25 kg emas yang dihibahkan kepada negeri<sup>13</sup>. Untuk mengetahui bagaimana peranan yang telah diberikan perempuan dalam perjuangan, maka dapat dilihat dari berbagai kelompok sosial yang ada termasuk aktifitas individu-individu yang berada di dalam kelompok tersebut. Pejuang veteran perempuan ini, berasal dari organisasi-organisasi perempuan yang ada di Sumatera Barat seperti Keputrian Republik Indonesia (KRI), Putra Putri Indonesia (PPI), Putri Ksatria, Sabil Muslimat, Bundo Kandung, Aisyiah, Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari), Gerakan Wanita Sedar (GERWIS) G.PII Putri, laskar Muslimat, dan lain-lain<sup>14</sup>, dan di antara organisasi-organisasi perempuan tersebut, yang ada dan berkembang di Kota Padang dan sekitarnya saat itu adalah KRI, Sabil Muslimat, dan Laskar Muslimat<sup>15</sup>.

Pada penelitian ini penulis menfokuskan untuk melihat kontribusi KRI, karena KRI merupakan organisasi perempuan pertama yang lahir di Kota Padang sehingga lebih awal berperan dan satu-satunya organisasi perempuan yang ada di Kota Padang, serta tidak terikat dalam suatu partai politik

---

<sup>11</sup> Ranah domestik merupakan konsep di mana wilayah kerja perempuan adalah di dalam rumah tangga yang lebih dikenal dengan istilah tiga ur (dapur, kasur, dan sumur).

<sup>12</sup> Ranah publik merupakan konsep wilayah kerja laki-laki di tempatkan di sector politik, ekonomi, masyarakat, dan pemerintahan.

<sup>13</sup> *Wawancara dengan bapak Sofian Udni. Sumbangan ini dikelola Oleh M. Hatta, namun pesawat ini tertembak dan jatuh oleh Belanda di teluk Hantu pada saat mau membeli senjata, yang dipiloti oleh Iswahyudi. Pesawat ini merupakan pesawat pertama yang dimiliki RI setelah Indonesia merdeka.*

<sup>14</sup> Ahmad Husein dkk. 1991., *Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di MinangKabau / Riau*. Jilid 1 Jakarta ; BPSIM.

<sup>15</sup> *Wawancara dengan bapak Sofian Udni (66th) tanggal 16 Oktober 2010. Beliau menjabat sebagai Sekertaris Legiun Veteran Sumatra Barat*

tertentu. KRI sudah terbentuk sejak awal proklamasi atas inisiatif kaum perempuan untuk turut andil dalam perjuangan. Ketika kemerdekaan telah diproklamkan dan para pemuda sibuk dengan pembantuan BPPI-PRI, maka kaum perempuan pun membentuk Keputrian Republik Indonesia di Padang, yang terbentuk pada 8 September 1945<sup>16</sup>. Adapun tujuan dari organisasi KRI adalah melatih peteri-puteri Indonesia agar tumbuh kesadaran bernegara. Kegiatannya antara lain membantu tentara membuat tanda pangkat dan menjahit baju, giat mengadakan latihan-latihan mengenai kepalangmerahan agar setiap saat dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, serta aktif di dapur umum, yang semuanya itu untuk membantu perjuangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia<sup>17</sup>.

Selain bertugas di garis belakang dan kepalangmerahan, anggota dari organisasi ini juga aktif dalam membantu tentara pejuang di garis depan seperti menjadi mata-mata atau kurir. Dengan cepat KRI meluas di Sumatra Barat dan pada bulan Maret 1946 diadakan Kongres yang pertama. Sesudah peringatan 1 tahun Kemerdekaan, KRI memindahkan Posnya ke Indarung disebabkan makin panasnya situasi dalam kota<sup>18</sup>, apalagi banyak penduduk yang telah mengungsi karena makin sulitnya kehidupan<sup>19</sup>. Dari Indarung<sup>20</sup>, KRI membantu perjuangan bergerak di front timur dalam bidang palang merah, perbekalan dan hiburan. Setelah situasi semakin gawat, KRI akhirnya di pindahkan ke Bukittinggi.

---

<sup>16</sup> Fatimah Enar dkk. 1978. *Sumatra barat 1945-1949*. Padang ; Pemda., hal 126

<sup>17</sup> Maryetti., 2000., *Peran Kaum Perempuan Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Front Timur Kota Padang.*, (Depdikbud ; Intisiar) hal 17

<sup>18</sup> Sebelum itu KRI berpusat di pusat kota yaitu di kampung Nias no 45, yang sebelumnya tempat Islamic Colleage.

<sup>19</sup> Hal ini disebabkan semakin tegangnya situasi pertempuran antara pihak Sekutu dan Republik. Fatmah enar dkk., *Op. cit.*, hal 126

<sup>20</sup> Letak pos KRI Indarung ini tepatnya di belakang pabrik Indarung

Siti Fatimah berpendapat, kurang nampaknya peran perempuan ini dikarenakan perempuan sering mengalami marginalisasi<sup>21</sup>. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, mengakui (dengan mengutip Kemal ataturk) ; *“Diantara soal-soal perjuangan yang harus diperhatikan, soal perempuan selalu dilupakan”*. Pada masa awal perjuangan dan masa sulit, perempuan selalu dilibatkan ditengah-tengah masyarakat, hingga akhirnya setelah perjuangan tercapai, maka perempuan dipinggirkan<sup>22</sup>.

Proses marginal itu setidaknya dapat dilihat dari dua hal<sup>23</sup>. Pertama, perempuan dianggap sebagai kelompok yang tersubordinasi<sup>24</sup>dari laki-laki. Kedua, perempuan selama ini hanya dianggap berusaha dengan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan ranah domestik, sementara laki-laki berusaha dengan ranah publik dan ini dianggap sebagai milik laki-laki saja, sehingga dari hal – hal seperti inilah membuat penulisan sejarah Indonesia selama ini dapat disimpulkan historiografi *Androsentris*<sup>25</sup>. Dilihat dari aspek metodologis, hal ini mungkin dianggap suatu hal yang sah saja, karena sejarah Indonesia masih bersifat elitis dan lebih tertarik pada persoalan–persoalan yang berhubungan dengan kekuasaan (politik). Akan tetapi perempuan yang disajikan dalam penulisan sejarah seperti itu, porsi yang diberikan kepada perempuan sangat sedikit.

Hal seperti ini juga penulis temui dalam tulisan-tulisan sejarah perjuangan kemerdekaan di Sumatera Barat. Dari buku-buku perjuangan tersebut (yang penulis temui), ada dua buku yang memberi porsi membicarakan peran perempuan secara khusus diantaranya tulisan Fatimah enar (*Sumatera Barat 1945-49*) dan Mestika Zed, Emizal Amri, dan Etmi Hardi., (*Sejarah Perjuangan Kemerdekaan 1945-1949 di Kota Padang dan Sekitarnya*). Namun di sana hanya membicarakan peran perempuan secara garis

---

<sup>21</sup> Marginalisasi yaitu proses peminggiran yang terjadi terhadap suatu kelompok baik secara sengaja maupun tidak sehingga menjadikan kelompok tersebut bisa hilang dalam pencatatan sejarah atau bahkan tidak dianggap

<sup>22</sup> Riant Nugroho. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*. (Yogyakarta ; Pustaka Pelajar), hal 26

<sup>23</sup> Siti Fatimah. *Perempuan dan Politik. ; Sekitar Issue Pemberdayaan Perempuan dengan Kuota 30%*. . 24 April 2004 di Fakultas Hukum Indonesia (UI)

<sup>24</sup> Subordinasi adalah sesuatu yang berkaitan dengan dunia politik dimana segala keputusan menjadi hak laki-laki

<sup>25</sup> Androsentris yaitu penulisan sejarah yang masih berpusat pada laki-laki.

besar saja, selain itu dalam buku-buku ini juga sangat sedikit sekali porsi yang diberikan dalam membahas peran perempuan yaitu sekitar 6 atau 8 halaman, sehingga penulis rasa hal ini belum cukup menjawab pertanyaan bagaimana peran perempuan pada masa revolusi khususnya di Kota Padang.

Dalam penulisan sejarah seperti ini, perempuan seakan merupakan kelompok yang dikuasai, bukan kelompok yang berada dalam kekuasaan dan perempuan benar-benar menjadi kelompok masyarakat yang marginal, yaitu suatu kelompok yang dipinggirkan atau tidak dianggap. Dilihat dari perspektif metodologi, sejarah yang demikian tergolong ke dalam sejarah subaltern, yang dalam hal ini dapat dikatakan menyebabkan hilangnya peran perempuan dalam sejarah atau dikenal dengan istilah *hidden woman history*<sup>26</sup>.

Kemerdekaan yang direbut dan dipertahankan dengan pengorbanan jiwa, raga dan harta generasi terdahulu, tentunya harus dipahami secara arif oleh generasi sekarang. Oleh sebab itu menurut penulis, perlu kiranya diangkat semua kisah-kisah pejuang pada saat mempertahankan kemerdekaan termasuk pejuang veteran perempuan ini. Pemahaman seperti ini diharapkan, akan membimbing generasi penerus untuk hati-hati berbuat dan bertindak dalam mengisi kemerdekaan ini. Dengan begitu orang akan terpelihara dari sikap dan perilaku yang hanya mementingkan diri atau kelompok sendiri, tanpa menghargai pengorbanan para pejuang dan generasi terdahulu.

Oleh sebab itu penulis melakukan penelitian ini, penulis ingin mengangkat tentang “Keputerian Republik Indonesia di Kota Padang dan sekitarnya pada masa Revolusi (1945 - 1949)”. Tentu saja disadari bahwa tulisan ini bukan yang pertama mengenai sejarah perjuangan di Kota Padang. Sejumlah buku yang membahas periode 1945 telah ditulis, baik oleh pelaku sejarah, wartawan, maupun peneliti sejarah yang khususnya membahas tentang sejarah perjuangan di Sumatra Barat.

---

<sup>26</sup> Siti Fatimah. *101 Kebangkitan nasional : Apakah perempuan punya Sejarah.*

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat disimpulkan batasan masalah penelitian ini adalah tentang peran dari organisasi KRI sebagai salah satu organisasi perjuangan perempuan pada masa revolusi di Kota Padang dan sekitarnya. Batasan temporalnya adalah dari tahun 1945 sampai 1947, tepatnya setelah Belanda melancarkan agresi militernya pertamanya di Kota Padang dan sekitarnya.

Untuk mendukung penelitian ini, maka dapat diajukan pertanyaan penelitian ;

Bagaimana peranan yang diberikan organisasi KRI sebagai salah satu organisasi perjuangan perempuan dalam mempertahankan kemerdekaan pada masa revolusi di Kota Padang dan sekitarnya ?

## **C. Tujuan dan manfaat**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah tentang peran dari pejuang perempuan di Kota Padang dalam mempertahankan kemerdekaan khususnya pada masa revolusi.

Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain;

- a. Secara akademik, penelitian ini berupaya mendeskripsikan peran dari pejuang perempuan di Padang dalam mempertahankan kemerdekaan khususnya pada masa perang revolusi
- b. Nilai praktisnya adalah untuk mendokumentasikan pengalaman histori yang terjadi di Kota Padang dan sekitarnya, sehingga tidak hilang dari memori kolektif generasi masa kini dan yang akan datang.

## D. TINJAUAN PUSTAKA

### a. Studi Relevan

Dari penelitian pustaka ditemukan banyak literatur-literatur yang mengkaji tentang peristiwa perjuangan di Sumatera Barat pada masa 1945-49. Namun dari semua karya tersebut, ada beberapa yang membahas tentang peran perempuan dalam perjuangan secara luas, khususnya di Kota Padang. Seperti dapat ditemukan dalam tulisan dari Maryetti, "*Pergerakan Kaum Wanita Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Front Timur Kota Padang tahun 1945-1950*", dalam buku ini dijelaskan peranan dan sumbangan kaum perempuan dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan tidaklah kecil. Pejuang-pejuang perempuan bangsa bahu-membahu dengan pejuang - pejuang pria dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan khususnya di Kota Padang dan sekitarnya. Hal ini sangat relevan dengan tulisan ini yang ingin menggambarkan kontribusi kaum perempuan pada masa revolusi di Kota Padang dan sekitarnya.

Buku *Perlawanan Masyarakat Padang Terhadap Sekutu (Oktober 1945-November 1946)* yang di suting oleh Zusneli Zubir. Dalam buku ini dijelaskan sejarah perjuangan kemerdekaan di Kota Padang dan sekitarnya, mulai dari kedatangan Sekutu di Teluk Bayur sampai kedatangan NICA (Belanda) di Kota Padang. Buku ini juga sangat relevan karena batasan spasialnya sama tulisan ini sehingga sangat membantu penulis dalam memahami Kota Padang dan sekitarnya pada masa revolusi.

Tulisan Fatimah Enar dan kawan-kawan yang berjudul *Sumatra Barat 1945-1949* tahun 1978. Buku ini menjelaskan tentang organisasi-organisasi perjuangan yang ada di Sumatera Barat. Buku ini sangat relevan dengan tulisan ini karena salah satunya ada membahas tentang organisasi KRI sehingga dapat memberikan gambaran secara garis besar bagi penulis.

Buku *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Minang Kabau 1945-1950* Jilid I. yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Pemurnian Sejarah Indonesia – Minang Kabau (B.P.S.I.M). Dalam buku ini menggambarkan lahirnya pergolakan serta proklamasi kemerdekaan dengan kelanjutan pembentukan susunan dan jalannya pemerintahan serta yang bertalian dengan itu, yaitu mempertahankan kemerdekaan yang hendak direbut kembali oleh pihak penjajah Belanda. Buku ini juga relevan dengan tulisan ini karena salah satunya ada menceritakan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Sumatera Tengah.

Selain itu buku yang relevan dengan penulisan ini adalah *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) di Kota Padang dan sekitarnya.*, karya dari Mestika Zed, Emizal Amri, dan Etmi Hardi. *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950* karya dari Audrey kahin. Karya Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Caniago dengan bukunya *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1950*. Karya P.R.S Mani dengan bukunya *Jejak revolusi 1945 “Sebuah kesaksian sejarah”*. Karya Drs. Muslim Ilyas dengan bukunya *Riwayat dan perjuangan Aziz Chan dll*, di mana tulisan-tulisan tersebut memberikankan gambaran bagi penulis tentang perang kemerdekaan di Sumatra Tengah dan juga di Kota Padang yang sangat membantu penulis dalam memahami keadaan revolusi saat itu khususnya pengaruh yang di berikan dan hubungannya dengan Kota Padang.

## b. Kerangka Konseptual

### a) Revolusi

Revolusi adalah perubahan-perubahan cepat, keras, kejam dan bahkan seringkali menelan banyak korban nyawa dan harta benda, yang berlangsung dalam suasana mencekam dan

ketidakpastian terhadap apa yang akan terjadi berikutnya<sup>27</sup>. Proses revolusi difahami sebagai proses yang amat luar biasa, sangat kasar, dan merupakan suatu gerakan yang paling terpadu dari seluruh gerakan-gerakan sosial apapun.

Ia difahami sebagai ungkapan atau pernyataan akhir dari suatu keinginan otonom dan emosi-emosi yang mendalam serta mencakup segenap kapasitas keorganisasian maupun ideologi protes sosial yang dikerjakan secara seksama, khususnya citra utopis atau pembebasan yang bertumpu pada simbol-simbol persamaan, kemajuan, kemerdekaan, dengan asumsi sentral ; bahwa revolusi akan menciptakan suatu tatanan sosial baru yang lebih baik. revolusi terjadi karena berbagai anomali (pergeseran) sosial atau ketimpangan yang sangat fundamental – terutama perjuangan antar elit ; perpaduan pergolakan tersebut dengan kekuatan sosial, maupun konflik golongan yang lebih dalam dan menyebarluas seperti konflik kelas, dan dislokalisasi serta mobilisasi sosial juga organisasi-organisasi politik dari berbagai kelompok sosial yang lebih besar (khususnya yang baru muncul).

Ada gambaran tentang pengaruh atau akibat dari revolusi, pertama perubahan secara kekerasan terhadap rezim politik yang ada, yang didasari oleh legitimasi maupun simbol-simbolnya sendiri. Kedua, pergantian elit politik atau kelas yang sedang berkuasa. Ketiga, perubahan secara mendasar seluruh bidang kelembagaan utama – terutama dalam hubungan kelas dan sistem ekonomi. Keempat, pemutusan secara radikal dengan segala hal yang telah lampau. Kelima, memberikan kekuatan Ideologis dan orientasi kebangkitan (millenarian) mengenai gambaran revolusioner<sup>28</sup>.

---

<sup>27</sup> Mestika Zed, Emizal Amri, dan Etmi Hardi. 2002. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) di kota Padang dan sekitarnya*. (Padang ; Yayasan citra budaya Indonesia).

<sup>28</sup> Sn. Eisenstann., 1986., *Revolusi dan Transformasi Masyarakat*. Jakarta ; Cv Rajawali., hal 3-5

Revolusi yang dimaksud adalah revolusi fisik<sup>29</sup>, yang mencitrakan betapa gigih perjuangan anak bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dalam revolusi fisik ini dilakukan melalui dua jalur, yakni perjuangan bersenjata dan perjuangan diplomasi<sup>30</sup>. Periode 1945-1950 inilah rakyat berkorban habis-habisan dan menderita tak terhingga buat mencapai dan mempertahankan kemerdekaan dan persatuan Nasional, setelah penjajahan dan perpecahan berabad-abad lamanya. Agustus 1945 – Desember 1950 merupakan revolusi yang dipandang sebagai manifestasi tertinggi dari tekad nasional, lambang kemandirian suatu bangsa dan bagi mereka yang terlibat didalamnya sebagai suatu pengalaman emosional yang luar biasa dengan rakyat di mana secara keseluruhan berpartisipasi secara langsung. William H. Fredrik dalam pengantar usaha bukunya, *the vision hear ; the making of the Indonesia Revolusion* (1988), bahwa revolusi nasional Indonesia (Agustus 1945- Desember 1949) merupakan salah satu revolusi dunia terbesar pada masa kontemporer, sehingga demikian masih menerima perhatian ilmiah<sup>31</sup>. Mencitakan revolusi berarti menerima sebuah jalan kekerasan untuk mengubah sistem. Revolusi Indonesia dalam hal ini adalah serangkaian upaya mengubah tatanan yang telah mapan dengan strategi kekerasan yang pada awal ditujukan pada fasisme Jepang dan Imprealisme Barat, khususnya Belanda<sup>32</sup>

## b) Organisasi Sosial

Sugiono mendefinisikan organisasi sosial sebagai sistem sosial yang dibentuk untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, artinya hubungan antar individu dan kelompok dalam suatu

---

<sup>29</sup> Revolusi fisik adalah perubahan ketatanegaraan (pemerintah atau keadaan sosial) yang dilakukan dengan kekuatan dan kekerasan. W.J.S., 1983., *Kamus Bahasa Indonesia.*, (Jakarta ; Balai Pustaka)

<sup>30</sup> Suwardi Purnama., 2000., *Sejarah Indonesia Modern Dalam Dialog.*, (Jakarta ; Cakrawala)

<sup>31</sup> Warniati Juser (2002/37800). “Perundingan tentang utang republik pada KMB. 2007 “, *Skripsi.* hal 8-9

<sup>32</sup> Mestika Zed., 2003. *Kepialangan politik dan Rrevolusi palembang 1900-1950.* (Jakarta ; LP3ES), hal

organisasi menciptakan harapan baru bagi perilaku individu. Harapan ini diwujudkan dalam peran-peran tertentu yang harus dihasilkan. Beberapa orang harus memainkan peran pemimpin sementara yang lainnya adalah pengikut<sup>33</sup>.

Masyarakat Indonesia betapapun mereka hidup sederhana, telah mengembangkan mekanisme dalam upaya memenuhi kehidupan, menjangkau sumber dan pelayanan serta berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan. Mekanisme tersebut di lembagakan dalam sebuah wahana berupa organisasi, baik yang dilandasi oleh keagamaan, kesukuan, maupun etnis. Organisasi itu dinamakan organisasi lokal.

Menurut Nurdin Widodo dan Suradi<sup>34</sup>; organisasi lokal memiliki bentuk yang bervariasi, seperti majelis ta'lim / pengajian / yasinan, peguyuban warga, perkumpulan suku tertentu, perkumpulan remaja, perkumpulan adat, ikatan pemuda mesjid, pemuda katolik atau Kristen, perempuan arisan, perkumpulan kesenian, perkumpulan olahraga, dan lain-lain. Lebih lanjut lagi mereka menguraikan dua cara pembentukan organisasi lokal, yaitu *pertama*, berdiri secara alamiah berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, seperti perempuan pengajian, keagamaan, ikatan keluarga, ikatan kesukuan dan warga, kelompok arisan, kelompok kesenian dan olahraga, serta adat. Organisasi ini sering adaptif dengan kemampuan lokal, dengan melestarikan dan mempertahankan nilai-nilai sosial budaya lokal, tradisi dan kebiasaan, serta sumber budaya lokal. *Kedua*, perkumpulan yang pembentukannya dikuasai oleh pemerintah. Organisasi ini merupakan perpanjangan tangan pemerintah kepada masyarakat seperti KUBE, PKK, Posyandu, dan sebagainya.

Merujuk pada hal tersebut diatas, organisasi KRI ini pada awalnya merupakan salah satu organisasi lokal yang dibentuk berdasarkan aspirasi kaum perempuan Minang (khususnya di Kota

---

<sup>33</sup> Sugiyanto., 2002., *Lembaga Sosial.*, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama) Hal 16

<sup>34</sup> Suradi. Widodo Nurdin., 2005., *Penelitian Profil dan Peranan Organisasi Lokal Dalam Pembangunan Masyarakat.*, (Jakarta : Balitbang Kesos)

Padang) yang ingin ikut serta turut membantu dalam perjuangan. Setelah itu, organisasi ini mendapat perhatian dari pemerintah sehingga terus berkembang dan ikut berjuang dengan organisasi-organisasi perjuangan lainnya. Karena organisasi ini memiliki fungsi membantu perjuangan akhirnya organisasi ini berada dibawah naungan pemerintah, namun organisasi ini tidak terikat secara penuh karena terlahirkan dari masyarakat itu sendiri. Hal ini terbukti ketika muncul organisasi perempuan di bawah naungan Perwari yang lahir setelah Marriati adnan memberi ceramah tentang organisasi ini sesuai perintah perwari pusat, namun organisasi KRI tetap dipertahankan di mana anggota-anggota KRI yang sebelumnya terdiri dari ibu-ibu dan gadis-gadis yang akhirnya memecah diri yaitu ibu-ibu masuk Perwari sedangkan gadis-gadis tetap di KRI.

Di dalam suatu organisasi sosial terdapat proses yang dinamis, di mana hubungan antar manusia yang di dalamnya senantiasa berubah-ubah ; tindakan setiap orang terhadap orang lain selalu berulang-ulang dan terkoordinasi. Namun demikian dalam organisasi sosial tercermin pula suatu pola tingkah laku yang terstruktur dalam setiap proses perubahannya. Jadi, organisasi sosial disamping sebagai suatu kondisi yang dinamis, juga sebagai kondisi yang bersifat struktural.

Dalam organisasi sosial, anggota-anggotanya tersusun (terstruktur) secara sistematis, masing-masing mempunyai status dan peran yang bersifat formal ; masing-masing bertugas memelihara dan berusaha bersama untuk mencapai tujuan bersama (umum). peran adalah sebagai seperangkat harapan-harapan yang dikenakan kepada individu yang menempati suatu kedudukan sosial tertentu<sup>35</sup>. Senada dengan itu Bruce. J. Cohen mendefinikan peran sebagai suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status tertentu.

---

<sup>35</sup> Berry David., 2982., *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi.*, (Jakarta ; Rajawali) Hal 99

Mengenai pengaturan tata hubungan antar anggotanya yang ingin mengadakan hidup bersama dalam suatu organisasi, menurut J.O Hertzler<sup>36</sup> memerlukan beberapa syarat, yaitu sebagai berikut ; (1) Harus ada ukuran yang tetap dalam tata hubungan sosial yang dapat diterima oleh anggota-anggota kelompok (organisasi). (2) Harus ada kekuasaan atau otoritas yang mempunyai daya paksa dalam melakukan tata hubungan sosial. (3) Adanya pengaturan dan penyusunan individu-individu dalam kelompok-kelompok dan lapisan sosial tertentu yang menggambarkan adanya koordinasi dan sub-ordinasi. (4) Anggota-anggota yang hidup dalam berbagai bidang, dapat hidup dalam suasana harmonis, yang saling memberi kepuasan. (5) Adanya tingkah laku yang telah merupakan standart itu disalurkan atau dipaksakan dengan mekanisme tekanan-tekanan sosial, menjadi suatu pola yang merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia.

Berdasarkan syarat-syarat yang dikemukakan Hertzler, maka nampak sekali adanya pola struktur yang ideal dalam suatu organisasi sosial, di mana sejumlah orang yang menjalankan suatu pekerjaan senantiasa dengan aksi telah direncanakan bersama. Di sisi lain, peran setiap individu dalam suatu kelompok sosial tertentu bersifat timbal balik. Dengan kata lain, dalam menjalankan suatu peran sosial tertentu individu tidak terlepas dari prinsip pertukaran.

Menurut Levi – Strauss<sup>37</sup> arti pertukaran itu adalah komitmen moral individu pada kelompok. Ia membedakan antara pertukaran ekonomi dan pertukaran sosial. Dalam pertukaran ekonomi, kepentingan individu diandaikan yang paling penting, dan pada pertukaran sosial integrasi dan solidaritas adalah hal yang terpenting.

## E. METODE PENELITIAN

---

<sup>36</sup> Abdulsyani., 1994., *Sosiologi, Skema, Teori dan Terapan.*, (Jakarta ; Bumi Aksara)

<sup>37</sup> *Ibid.*,

Metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian sejarah, yang dibagi dalam empat tahap<sup>38</sup>. Tahapan pertama, penelitian diawali dengan pencarian dan pengumpulan sumber yang dikenal dengan istilah heuristik. Data yang dicari adalah dokumen-dokumen tentang organisasi-organisasi perempuan. Data lain yang ingin dicari adalah tentang peran perempuan baik secara individual maupun organisasi dalam perjuangan. Dalam rangka mengumpulkan sumber tertulis yang relevan dengan tema yang sedang dikaji, maka penulis melakukan studi kepustakaan. Studi pustaka dilakukan di beberapa tempat seperti Perpustakaan daerah Sumatera Barat, Badan Arsip Daerah, dan dokumen-dokumen dari kantor administrasi Veteran CAD-1/27 BABINMINVETCADDAM -I / BUKIT BARISAN, dan kantor Legiun Veteran Padang. Untuk bahan pendukung, peneliti juga melakukan studi ke pustaka pusat Universitas Negeri Padang, pustaka FIS UNP, Labor Jurusan Sejarah UNP, perpustakaan UNAND, Gedung Djuang DHC 45', PDIKM Padang Panjang, dll.

Selain itu Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian sejarah kontemporer, yang dapat di definisikan sebagai “die Epoche der mittlebande und wissenschaftliche behandlung”, yang berarti sejarah kontemporer adalah zaman dari mereka yang hidup bersamaan, yakni bersamaan baik pembaca maupun sejarawannya, serta penggarapnya dilakukan secara ilmiah, maka dapat digunakan metode wawancara (oral histori). Wawancara akan dilakukan terhadap pejuang-pejuang yang masih hidup untuk mendapatkan kesaksian langsung dari mereka, dengan standar yang telah ditentukan.

Tahapan berikutnya adalah kritik atau tahapan verifikasi, yaitu tahapan atau kegiatan meneliti dan menyeleksi sumber, informasi, jejak secara kritis. Tahap ini menyingkirkan bahan-bahan atau bagian yang tidak otentik. Setiap sumber memiliki dua aspek yaitu ekstern dan intern, karena itu kritik pun terbagi menjadi dua yaitu kritik Intern dan kritik Ekstern. Kritik intern

---

<sup>38</sup> Louis Gootschalk., 1975., *Mengerti Sejarah.*, Jakarta ; Yayasan Penerbit UI. (Hal 132)

merupakan proses penyeleksian data dengan menyelidiki kredibilitas sumber atau kebiasaan yang dipercayai, sedangkan kritik ekstern menyelidiki otentisitas sumber atau keaslian sumber.

Tahapan selanjutnya adalah menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai bahan yang otentik dengan melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap data tersebut. pada tahap ini adalah penyusunan data yang diperoleh berdasarkan kronologis kejadian dan berdasarkan hubungan kausalitas ( sebab akibat).

Tahap terakhir adalah penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya itu menjadi satu kisah atau penyajian yang berarti, yaitu data yang terkumpul kemudian diolah dan ditulis dalam bentuk karya ilmiah yaitu *Skripsi*.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM KOTA PADANG**

#### **DAN MASYARAKATNYA PADA MASA REVOLUSI**

##### **A. Kota Padang pada masa Revolusi Fisik**

Berita proklamasi kemerdekaan RI sudah sampai pertama kali di Kota Padang pada malam hari tanggal 17 Agustus 1945 melalui Pos, Telegraf, dan Telepon (PTT) Padang, namun informasi ini masih

beredar dikalangan terbatas<sup>39</sup>. Setelah itu secara sembunyi-sembunyi berita tersebut<sup>40</sup> sampai juga kepada pemimpin-pemimpin Sumatera Barat yang kebetulan berada di Kota Padang antara lain Bapak M.Syafei dan Chatib Sulaiman, selanjutnya pemimpin-pemimpin tersebut mengadakan musyawarah, dan keesokan harinya teks proklamasi sudah disebarluaskan ke berbagai tempat di Kota Padang dan daerah-daerah Sumatera Barat lainnya<sup>41</sup>.

Setelah para pemimpin di Sumatera Barat sepakat agar dibentuk sebuah badan yang akan menjadi wadah perjuangan nantinya. Wadah itu diberi nama Badan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI)<sup>42</sup> yang berpusat di Pasa Gadang dan bertugas memberikan penjelasan kepada orang yang datang menanyakan kebenaran proklamasi kemerdekaan dan juga memberi penerangan kepada masyarakat sampai ke berbagai daerah di Sumatera Barat. BPPI ini nantinya memberi andil cukup besar dalam memprakarsai terbentuknya Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID)<sup>43</sup> Sumatera Barat dan Badan Keamanan Rakyat (BKR)<sup>44</sup>.

---

<sup>39</sup> Hal ini karena Jepang telah memblokir semua komunikasi dengan pihak asing dan antar daerah di Indonesia, sehingga jalur komunikasi resmi antara Jakarta dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia menjadi terputus kecuali komunikasi yang disampaikan secara sembunyi-sembunyi oleh kelompok Republikan baik melalui radio maupun telepon.

<sup>40</sup> Berita proklamasi pertamakali disebarkan oleh Aladin (seorang pegawai PTT) di Bukittinggi. lihat Mistika Zed dkk., *Sej.. Op. cit.*, Hal 58

<sup>41</sup> Keadaan Kota Padang pada awal kemerdekaan ini hampir sama dengan di Jakarta dan Kota-Kota lain. Bendera merah putih berkibar dimana-mana, kantor-kantor pemerintah dikuasai oleh kaum Republikan. Adapun sikap penduduk sangat bermusuhan terhadap orang asing, terutama Belanda. Begitu antipatinya, sampai semua orang kulit putih dicap sebagai orang Belanda. Zubir Zusneli dkk., *Per...Op. cit.*, hal 9.

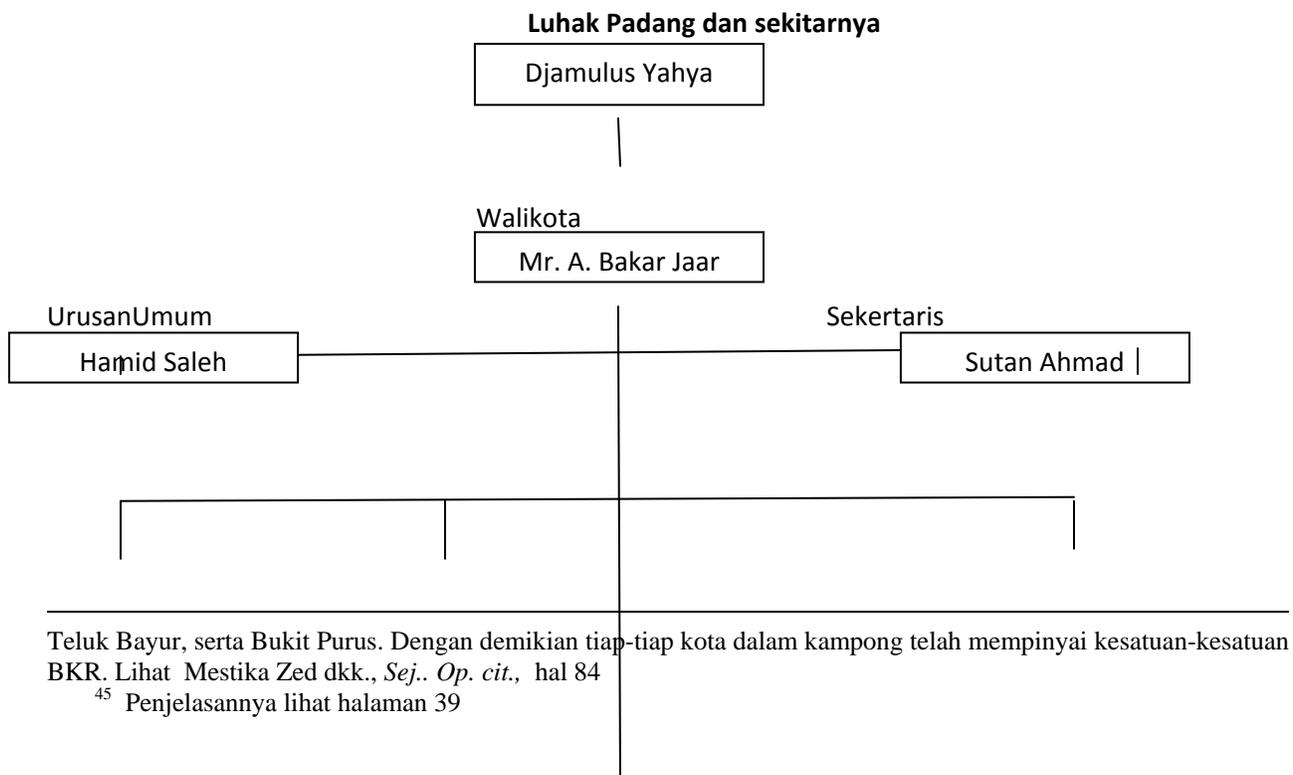
<sup>42</sup> Semua tokoh pimpinan sepakat atas gagasan tersebut, tetapi masing-masing mereka menolak untuk menjadi pemimpin sehingga mereka sepakat memilih dua orang sebagai pemimpin yaitu Ismael Lengah dan Chatib Sulaiman.

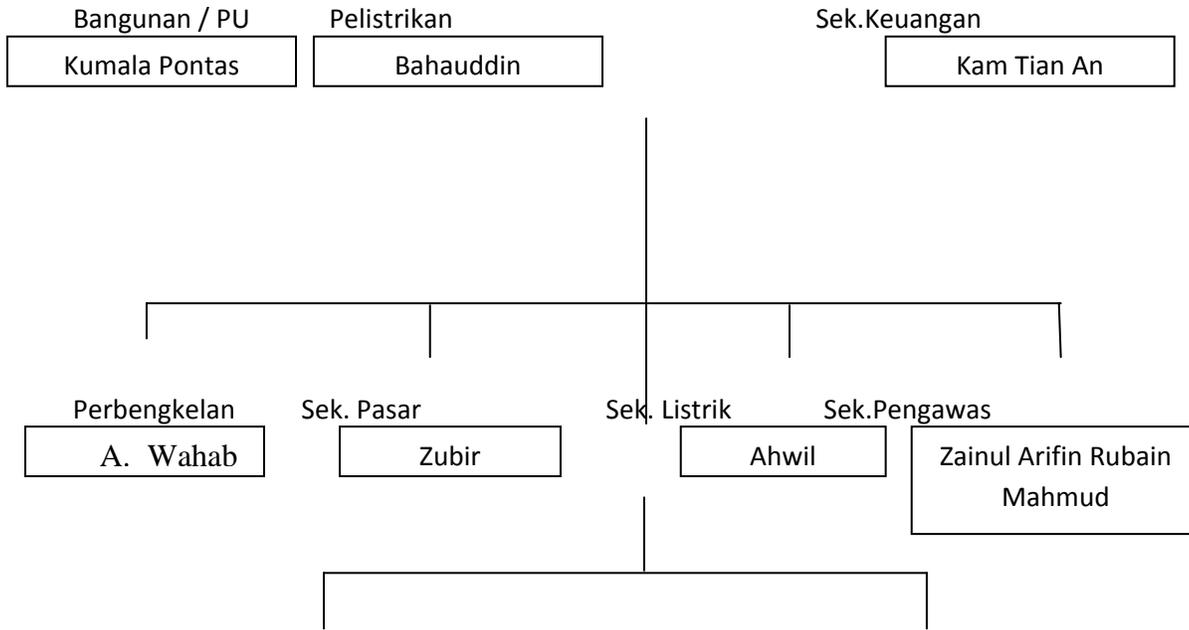
<sup>43</sup> Terbentuk pada 31 Agustus 1945 dengan tugas pokok untuk mengkoordinasi pembentukan di seluruh Sumatera Barat

<sup>44</sup> BKR terbentuk pada 1 Oktober 1945 yang bertujuan menjaga keamanan dan melakukan berbagai persiapan menghadapi perjuangan fisik melawan Jepang maupun tentara sekutu yang akan mendarat di Kota Padang. Satu bulan setelah diproklamkan kemerdekaan, yakni pada bulan September 1945, pemuda Kota Padang telah giat melakukan pengawasan di kampung-kampung dengan membentuk badan keamanan sendiri yang anggota-anggotanya pemuda-pemuda bekas Gyu Gun atau Heiho yang telah mendapat latihan militer. Kelompok-kelompok pemuda ini mengambil posisi pada tempat-tempat yang dianggap dapat menguasai keadaan dan segala kemungkinan yang akan terjadi. Berdasarkan pertimbangan itu maka daerah yang menjadi pusat kekuatan adalah daerah Jati, dengan daerah pengawasan meliputi Simpang Haru, - Parak Gadang, Gurun Lawas – Air Camar, dan tentunya Jati sendiri. Selain itu pengawasan juga dilakukan di daerah Parak Karambil, Olo, Alang Lawas, Seberang Padang, dan

Melalui dekrit president tanggal 5 Oktober 1945 yang menginstruksikan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), maka batalion BKR Padang diresmikan menjadi TKR yang dipercayakan kepada Ismael Lengah. TKR pada prinsipnya berawal dari bawah, hidup atas bantuan rakyat, dan mencari persenjataan sendiri (bukan disuplai oleh pemerintah). Adapun struktur organisasi dan lokasi TKR, sama sewaktu pembentukan BKR. Selain TKR, di Padang saat ini juga sudah ada terbentuk barisan lasykar seperti Barisan Hulu Balang yang dipimpin oleh O.K. Ganto Suaro, dan batalion Hizbullah yang di komandani Mayor Syuib Ibrahim dengan tugas pertama yang dilakukan adalah merampas senjata Jepang di Muaro, Gadut, dan Rimbo Kaluang. Selain itu juga ada pasukan cilik yang bertugas mengumpulkan peluru yang tertebaran di Muara Penyalinan, Muara Purus, dan Muara Padang<sup>45</sup>.

Pada tanggal 8 Oktober 1945, pemerintah Sumatera Barat mengeluarkan ketetapan residen tentang luhak-luhak. Adapun luhak Padang dan sekitarnya di kepalai oleh Djamulus Yahya (Oktober 1945-1946), dengan struktur distrik (luhak) seperti di bawah ini :





Padang Kota terdiri dari 13 kampung

Padang luar kota

Sumber data ; Kantor BPPI Pasar Mudik Padang

Padang kota terdiri atas tiga belas kampung yang diperintah oleh kepala kampung, sedangkan Padang luar kota terdiri atas tiga kecamatan<sup>46</sup>.

### Kedatangan Sekutu di Padang

Pada tanggal 1 Oktober 1945 Sekutu sudah mulai memasuki Kota Padang yang dilakukan secara bergelombang. Pada gelombang pertama dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1945 yang mendarat di Teluk Bayur, pendaratan pertama ini dipimpin oleh Mayjend H.M. Chambers terdiri dari brigade divisi India ke-26 jumlah kurang lebih satu batalion<sup>47</sup>, mereka ditemani oleh mayor Jendral A.I. Spits sebagai

<sup>46</sup> Penjelasannya lihat halaman 38-39

<sup>47</sup> Zubir Zusneli dkk., *Per...Op. cit.*, hal 32.

wakil Belanda<sup>48</sup>. Pada tahap berikutnya tanggal 13 Oktober 1945 di tempat yang sama mendarat pula tentara Sekutu sebanyak 12 kapal yang penuh dengan muatan barang, logistik, dan amunisi. Kedatangan Sekutu di Kota Padang disambut dengan berbagai perasaan oleh masyarakat Kota Padang. Ada yang merasa senang karena Jepang yang kejam akan dikembalikan ke negerinya. Ada yang senang kepada Belanda dari pada Jepang yang sangat kejam terlebih-lebih kepada kaum perempuan, mereka menganggap kehidupan pada masa pendudukan Belanda menyenangkan, sehingga ingin kembali seperti semula. Namun, secara umum masyarakat Kota Padang menolak kedatangan Sekutu dan lebih menginginkan kemerdekaan<sup>49</sup>.

Walaupun Sekutu berjanji melucuti senjata Jepang dan memulangkan orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang, tapi pelaksanaannya tidak demikian. Tugas yang diberikan kepada tentara Sekutu telah disalah gunakan, tujuan kedatangan dan janji Sekutu itu hanya merupakan kamufase saja. Yang sebenarnya terjadi Belanda adalah bagian dari tentara Sekutu oleh karena itu Sekutu membina, melatih, bahkan mempersenjatai orang-orang Belanda bekas tawanan Jepang. Pada awal kedatangannya, pemuda-pemuda sebenarnya tidak bermusuhan dengan Sekutu tetapi melihat keberpihakan sekutu kepada NICA Belanda, maka terjadilah bentrok antara Sekutu dengan pihak Republik (pemuda)<sup>50</sup>.

Pihak Sekutu (Inggris) selalu menuduh aksi-aksi ekstrimis sebagai penghalang tugas mereka di Kota Padang. Pemimpin Republik menangkisnya dengan mencoba menunjukkan aksi-aksi pemuda tersebut merupakan manifestasi kekecewaan rakyat atas peran Inggris yang dimanfaatkan atau

---

<sup>48</sup> Untuk diketahui bahwa A.I Spits sebelumnya pernah menjabat sebagai Gubernur Belanda di Sumatera.

<sup>49</sup> Sejak Sekutu atau Belanda masuk, Kota Padang dalam keadan sepi. Orang-orang yang ingin merdeka mengambil sikap mengungsi ke Padang luar kota atau ke Bukittinggi. Yang tidak mau mengungsi hanya orang-orang yang ; pertama, memang tidak mau mengungsi. Kedua, pejabat-pejabat yang dirangkul oleh Belanda untuk bekerja lagi. Zubir Zusneli dkk., *Per...Op. cit.*, hal 33.

<sup>50</sup> Bentuk perlawanan yang dilakukan dimulai dengan perlawanan tanpa kekerasan berupa aksi coret-coret dimana-mana, terutama di tempat-tempat yang mudah terlihat. Kata-kata yang ditulis pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia, dan Inggris seperti "down with the imperialism", "merdeka atau mati", "awasi anjing-anjing NICA", "away with the colonialism", "Indonesia for Indonesians", dan lain-lain. Zubir Zusneli dkk., *Per...Op. cit.*, hal 10.

memberi kesempatan kepada Belanda untuk tujuan mengembalikan kekuasaannya yang dirampas Jepang. Sekutu mulai melakukan pengeledahan dan menangkap terhadap orang-orang Republik yang dicurigai, sehingga situasi tersebut menyebabkan situasi Kota Padang tidak aman lagi<sup>51</sup>, tempat yang paling sering menjadi sasaran pengeledahan Sekutu adalah kantor BPPI, sampai kemudian ada seorang pegawai BPPI yakni Sulaiman yang ditahan sehingga menimbulkan kemarahan rakyat.

Tindakan-tindakan sepihak Sekutu telah memicu bagi dilakukannya perlawanan yang tidak hanya terbatas sebagai aksi coret-coret saja, tetapi perlawanan berupa "action". Hal ini terlihat dari semakin seringnya dilakukan penyerangan ke dalam kota untuk memperoleh senjata. Penyerangan yang dilakukan bukan secara membabi buta, melainkan melalui persiapan yang matang dengan mendahului oleh adanya data yang lengkap tentang lokasi atau sasaran yang akan dituju. Di sini organisasi perempuan KRI ini memberikan perannya, sebagai kurir mereka bisa menyelip ke daerah musuh sehingga memperoleh data tentang situasi di sana dan kemudian memberikan laporan kepada tentara Republik. Dengan bekal data yang diperoleh ini penyerangan dapat dilakukan dengan efektif sehingga kemungkinan tingkat keberhasilan menjadi cukup tinggi. Selain itu dengan semakin seringnya dilakukan penyerangan, kebutuhan akan makanan dan perawatan atau obat-obatan di daerah pertempuran juga semakin tinggi. Hal inilah yang mengetuk hati nurani para perempuan untuk ikut serta dalam perjuangan seperti menjadi anggota dari organisasi KRI.

Kemudian sebahagian di antara para pejuang yang pro kemerdekaan memutuskan pergi mengungsi ke luar kota (Padang Luar Kota) guna mengkonsolidasikan dan melanjutkan perjuangan berikutnya, sehingga medan perjuangan di Kota Padang menghadapi Sekutu, NICA Belanda dan kaki

---

<sup>51</sup> Puncak dari kemarahan pihak Sekutu adalah pada peristiwa Sungai Baramah 3 Desember 1945, dengan terbunuhnya Mayor Anderson yang merupakan salah seorang staf penting Panglima Sekutu Brigadir Hutchinson dan Nona Allingham dari Palang Merah Internasional.

tangganya terbagi menjadi dua bagian yaitu Padang Kota dan Padang Luar Kota<sup>52</sup>. Guna mempersiapkan perlawanan secara terkoordinir dan tepat guna, maka pejuang-pejuang di Padang luar kota membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dengan kekuatan empat kompi, yaitu :

- kompi Anduriang dipimpin oleh Yusuf Ali
- kompi Korong Gadang dipimpin oleh Anwar Badu
- kompi Indarung dipimpin oleh Sayuti Amin
- kompi Kuranji dipimpin oleh Ahmad Husein

Selain TKR, barisan-barisan rakyat seperti Hizbullah, TEMI, Sabilillah dan lain sebagainya di luar Kota Padang disatukan ke dalam satu wadah yang bernama Dewan Perjuangan, yang berpusat di Limau Manis. Dewan perjuangan ini dibawah pimpinan Kapten Haji Salim Yakub. Selanjutnya Dewan Perjuangan ini dibagi menjadi dua, yaitu Dewan Perjuangan Padang timur dan Dewan Perjuangan Padang utara dibawah pimpinan Abdul Muluk (Camat Kota Tengah). Sedangkan di dalam Kota Padang, memiliki Dewan Perjuangan tersendiri dibawah pimpinan Djamaluddin Wak Ketok. Antara TKR dengan pasukan barisan rakyat ini merupakan satu kesatuan yang utuh yang saling kerja sama bahu-membahu dalam menghadapi musuh. Untuk menyamakan gerak dalam perjuangan, maka barisan-barisan rakyat dikoordinir langsung oleh pimpinan TKR.

Pada tanggal 1 Juli 1946 diumumkan bahwa seluruh kedudukan tentara Sekutu di luar pulau Jawa, Madura, dan Sumatera telah diserahkan kepada Belanda. Tanggal 24 Oktober 1946 Sekutu kemudian mengumumkan bahwa penarikan pasukannya dari Bogor, Palembang, Medan, dan Padang.

---

<sup>52</sup> Meskipun demikian, pemuda-pemuda pejuang yang ada di Kota Padang dan Padang luar kota satu sama lainnya saling mendukung dan saling bekerja sama menghadapi musuh-musuh Republik. Strategi yang diterapkan pada saat itu mengariskan bahwa pejuang yang ada di dalam kota berusaha mendapatkan senjata, amunisi, dan obat-obatan disamping informasi tentang gerak-gerik Sekutu untuk diberikan kepada pejuang di Padang luar kota. Sebaliknya, pejuang-pejuang yang ada di luar kota senantiasa melakukan serangan terhadap pusat-pusat kedudukan Sekutu dan NICA dengan tujuan melemahkan kekuatan posisi musuh

Pada tanggal 17 Oktober 1946, Belanda mulai mendaratkan pasukannya di Kota Padang. Perlu juga diketahui bahwa sebelum Sekutu menarik tentaranya dan menyerahkan kekuasaannya termasuk orang-orang tahanannya kepada Belanda, pernyataan tersebut mendapat protes yang sangat keras dari Mr. S.M. Rasyid (Residen Sumatera Barat), namun protes itu tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Sekutu<sup>53</sup>.

### **Sekutu (Inggris) pergi, Belanda berkuasa**

Tepat pukul 12.00 WIB, tanggal 28 November 1946 pasukan Inggris (Sekutu) secara resmi menyerahkan kekuasaannya kepada Belanda di Kota Padang<sup>54</sup>, di mana pasukan Belanda tersebut terlebih dahulu mendarat di Teluk Bayur dengan kapal KPM “de Ruys” pada tanggal 20 November 1946<sup>55</sup>. Kedatangan pasukan Belanda langsung disambut oleh para pejuang Republik dengan ranjau dan lemparan granat, dan puncaknya pada tanggal 2 Desember 1946, menjadikan hari terberat bagi Belanda dalam minggu-minggu pertama kedatangannya di Padang, karena pada hari itu 10 orang serdadu mereka dibantai pejuang Republik di tengah jalan menuju Tabing. Serdadu Belanda yang baru sampai di Kota Padang tampaknya begitu terperanjat dan shock ketika mendapati keadaan kota yang mereka sebut “Wild-west” Padang, yang amat berbahaya. Dua hari setelah kedatangannya, pasukan Belanda mulai melakukan tindakan-tindakan pembalasan terhadap pejuang Republik<sup>56</sup>. Hal ini terus berlanjut, sampai pada tanggal 8 Desember 1946, ketika diadakan cease fire atau gencatan senjata di antara kedua pihak yang berdasarkan keputusan pusat.

---

<sup>53</sup> Zubir Zusneli dkk., *Per... Op. cit.*, hal 75

<sup>54</sup> Dalam serah terima itu, Belanda diwakili oleh Letkol. J.W. Sluyter

<sup>55</sup> Mestika Zed dkk., *Sej.. Op. cit.*, hal 241

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 242

## Perundingan Linggarjati

Perundingan-perundingan yang macet antara Republik dengan Belanda selama masa pemerintahan Sekutu di mulai lagi sejak tanggal 22 November 1946. Hasilnya ialah perundingan Linggarjati, yang ditandatangani secara resmi oleh kedua belah pihak pada tanggal 25 Maret 1947. Di Kota Padang sendiri terjadi kesepakatan pembagian daerah kekuasaan dan garis demarkasi, serta soal keamanan di daerah kantong (kota) pendudukan Sekutu sebelumnya. Setelah itu Belanda memajukan tuntutan supaya TRI dan semua barisan pejuang lasykar menyingkir dari lingkungan kota, sehingga hal ini semakin membuat geram pihak Republik. Soal tanggung jawab keamanan kota akhirnya pihak Republik diwakilkan kepada polisi Republik sejumlah 125 orang, di mana keputusan-keputusan ini tentu saja terasa sangat merugikan tetapi harus diterima mengingat lemahnya posisi Republik saat itu.

Namun, para perunding Republik menolak untuk melakukan gencatan senjata sehingga membuat Belanda sakit hati, lebih-lebih lagi karena Belanda juga harus berhadapan dengan kelompok yang bulat-bulat menentang perundingan<sup>57</sup>. Meskipun sejak akhir Maret keadaan kota dan sekitarnya agak sedikit tenang, serdadu Belanda tetap melakukan tugas-tugas rutin patroli yang dilakukan setiap pagi, sambil mencari komandan Republik setempat di persembunyiannya dengan maksud berdamai<sup>58</sup>. Namun kesediaan Belanda untuk memberikan konsepsi terhadap Republik terbukti ternyata adalah sikap yang pura-pura, karena beberapa bulan kemudian Belanda mulai main hakim sendiri. Walikota Padang, Aziz Khan tewas ditangan mereka dan dua hari kemudian mereka mengkhianati persetujuan Linggarjati dengan melakukan apa yang mereka sebut dengan "actie politionele" (tindakan pengamanan polisi). Serangan brutal Belanda tersebut membatalkan kesepakatan damai yang sudah dirintis sebelumnya.

---

<sup>57</sup> Sebagai akibat kegagalan dalam perundingan ini, maka pada 31 Desember 1946, Belanda melancarkan serangan sakit hati ke beberapa daerah pinggir kota, namun pasukan TRI dan lasykar tidak pernah muncul dalam pertempuran frontal, sehingga membuat serangan Belanda tidak efektif.

<sup>58</sup> Bagaimana peristiwa perundingan damai itu, persisnya berlangsung di kampung Kalawi. lihat Mestika Zed dkk., *Sej.. Op. cit.*, hal 256

## **Agresi Belanda I**

Kesepakatan Linggarjati yang telah disepakati ternyata tidak dapat memuaskan Belanda, terbukti pada akhirnya Belanda lebih memilih jalan kekerasan untuk menyelesaikan konflik dengan pihak Republik. Pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan serangan militernya secara serentak di seluruh Indonesia (termasuk Padang), namun di Kota Padang kondisi ini betul-betul tidak menguntungkan pihak Republik, karena para pemimpin sipil dan militer sedang dalam keadaan yang tidak siap.

Serangan Belanda dilakukan tengah malam pada tanggal 21 Juli, mula-mula ditujukan kepada kekuasaan pemerintahan sipil dan polisi Republik di dalam kota. Malam hari itu juga pasukan Belanda bergerak menyebrang garis demarkasi menuju utara, selatan, dan timur Kota Padang, tidak sampai satu bulan kemudian Belanda telah berhasil menduduki wilayah Republik sampai ke Lubuk Alung kira-kira 34 Km utara Padang, sekitar 23 Km ke timur sampai ke Soebang, dan sekitar 32 Km ke selatan di wilayah Bungus.

Agresi Belanda pertama ini hampir tidak mendapat perlawanan yang berarti dari pihak pejuang Republik. Tidak ada satu serangan tangkisan dan gerakan penghadangan yang betul-betul terencana dari TRI dan lasykar bersenjata, kecuali hanya tembakan sporadis sambil mundur kebelakang daerah demarkasi. Serangan militer Belanda tersebut secara langsung juga membawa dampak yang cukup besar terhadap kedudukan Republik di Kota Padang, termasuk jajaran pemerintahan dan para pejuang. Perubahan penting dalam pemerintahan antara lain adalah dipindahkannya pusat pemerintahan Kota Padang ke Padang Panjang. Di samping itu Bupati Padang Padang Pariaman juga terpaksa mengungsi ke Solok. Said Rasyad yang naik menggantikan posisi Aziz Khan memimpin pemerintahan kota yang telah

ditinggalkan itu dari Padang Panjang, yang disibukan dengan urusan-urusan pengungsian rakyat<sup>59</sup>, serta barisan tentara dan lasykar yang belum terkoordinasi kembali dengan baik paska agresi.

Akibat serangan mendadak Belanda, para komandan TRI dan barisan lasykar yang berada dipinggir kota terpaksa menyingkir keluar kota bersama pasukannya, terutama kearah timur kota. Konsentrasi pasukan Republik di sekitar Tabing dan Lubuk Buaya di utara, Bungus dan Teluk Kabung di selatan, serta air Sirah di timur menjadi kocar kacir. Para pejuang Republik terpaksa menyingkir ke daerah-daerah yang lebih belakang atau hutan-hutan di sekitarnya untuk kembali menyusun kekuatan. Baru beberapa hari kemudian, TRI dan barisan lasykar berhasil melakukan konsolidasi pertahanan, terutama dengan mengaktifkan kembali front-front pertempuran yang sudah dibentuk sebelum agresi. Untuk kepentingan strategis perjuangan, maka daerah operasi para pejuang dibagi atas tiga unit daerah gerilya dengan mengikuti garis pertahanan sebelumnya, yakni front timur, front utara, dan front selatan. Front timur meliputi sepanjang arah ke Solok (mulai dari ladang padi). Front utara meliputi daerah Sicincin, Kayu Tanam, dan Guguk. Sementara front selatan membentang dari Siguntur tua sampai Sungai Penuh. Ketiga front tersebut menjadi pusat pertahanan tentara dan para pejuang Republik guna melancarkan serangan balasan terhadap kedudukan Belanda di dalam kota<sup>60</sup>.

Kondisi yang serba darurat itu membuat roda kehidupan ekonomi rakyat menjadi tidak normal. Para pengungsi maupun masyarakat setempat berada dalam keadaan sulit dan serba susah. Persediaan pangan terbatas, sementara mulut yang harus makan semakin bertambah, sehingga kebutuhan makan kadang kala tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya. Dalam keadaan yang serba kekurangan itu, maka penyakit menular pun mudah berjangkit. Periode pengungsian dan ketegangan ini berlangsung beberapa bulan lamanya sampai dimulainya kembali perundingan antara Belanda dan Republik pada

---

<sup>59</sup> Arus pengungsian penduduk ke utara relatif lebih sedikit jika dibandingkan ke arah timur. Hal ini lebih disebabkan oleh alasan keamanan karena jalan antara Tabing dan Lubuk Buaya di blockade secara ketat oleh Belanda dan Solok saat itu merupakan gudang beras Republik di front timur pada masa revolusi.

<sup>60</sup> Mestika Zed dkk., *Sej.. Op. cit.*, Hal 276

bulan September 1947. Sejak itu pula para pengungsi berangsur-angsur kembali lagi ke tempat asal mereka.

### **Perundingan Renville**

Kurang dua bulan setelah Agresi pertama, dilakukan gencatan senjata antara Belanda dan pihak Republik, gencatan senjata tersebut bisa tercapai berkat campur tangan dunia Internasional. Pada tanggal 17 Agustus 1947 diumumkan gencatan senjata secara resmi, di bawah pengawasan KTN perundingan antara Belanda dan pihak Republik kembali dilakukan. Hasilnya ialah persetujuan Renville yang di tandatangani kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1949, di mana butir-butir perjanjian Renville menimbulkan persoalan baru khususnya soal penetapan batas wilayah (garis demarkasi), serta rencana pembentukan Negara federal.

Untuk Kota Padang, Belanda dengan mudah mendapat konsesi perluasan daerah kekuasaan lewat kemenangan diplomasi atau yang lebih dikenal dengan status quo. Garis status quo yang dirundingkan di Padang itu menetapkan batas demarkasi antara Republik dan Belanda sebagai berikut : di bagian utara adalah Batang Tapakis, di timur di dekat Air Sirah, dan arah selatan daerah Siguntur. Daerah-daerah itu merupakan batas garis Van Mook, kesatuan TRI dan barisan lasykar yang berada di sana harus keluar. Dengan sendirinya anggota pemerintahan dan keluarga mereka juga harus mengungsi dari Padang<sup>61</sup>.

### **Sekali lagi Belanda melancarkan agresinya**

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hal 290

Persetujuan Renville yang disepakati kedua belah pihak pada tanggal 17 Januari 1948 ternyata tidak banyak membantu untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di antaranya. Perundingan-perundingan lanjutan pasca Renville senantiasa mengalami jalan buntu, karena kedua belah pihak sama-sama tetap berpegang teguh pada prinsipnya, terutama dalam hal penetapan daerah demarkasi.

Hari Minggu tanggal 19 Desember 1948, tepat jam 06.00 pagi, Wakil Mahkota Belanda, Dr. H.V.K. Beel mengeluarkan pernyataan melalui radio Batavia bahwa pemerintahan kerajaan tidak terkait lagi dengan perjanjian Renville. Bersamaan dengan itu Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap Ibukota Republik, Yogyakarta, sedangkan di Sumatera Barat sasaran utama Belanda dalam agresi kedua adalah untuk menduduki pusat pemerintahan sipil dan militer Republik yaitu daerah Padang Panjang dan Bukit Tinggi.

Di daerah Padang Panjang, pasukan Belanda yang bergerak dari Padang menuju arah utara bergabung pasukan yang turun dari Singkarak untuk selanjutnya masuk ke Bukittinggi. Ibukota Sumatera itu akhirnya jatuh pada tanggal 21 Desember, tetapi sebelumnya semua aparat pemerintahan sudah menyingkir ke pedalaman. Setelah kejatuhan Bukittinggi dan Yogyakarta, para pemimpin Republik yang ada di Sumatera Barat segera mengambil alternatif dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di bawah Menteri Mr. Sjafrudin Prawiranegara. Sejak itu panggung sejarah perjuangan berpindah dari Padang ke pedalaman guna menjalankan roda pemerintahan PDRI, secara berpindah-pindah dalam pengungsian di hutan-hutan pedalaman Sumatera Barat<sup>62</sup>.

Meskipun demikian, tidak berarti Padang ditinggalkan sama sekali oleh pejuang Republik. Selepas agresi militer pertama kedudukan Republik sudah jauh di belakang garis Van Mook. Tetapi

---

<sup>62</sup> Setelah agresi militer Belanda kedua, focus perjuangan perjuangan dan pertempuran di Sumatera Barat beralih ke daerah pedalaman. Pendudukan kota-kota utama Republik oleh Belanda memaksa para pemimpin di daerah itu untuk kembali memikirkan strategi perang gerilya. Pemikiran ini di perkuat lagi oleh kenyataan buruknya kondisi TRI pasca agresi. Di samping kesatuan-kesatuan tentara yang tercerai berai, keanggotaannya pun tidak utuh lagi. Banyak dari anggota-anggota TNI yang terlepas dari induk kesatuannya dan tersebar di tempat-tempat yang berjauhan. Karena itu perang gerilya menjadi satu-satunya pilihan guna menghadapi kekuatan Belanda. Lebih jauh lihat Mestika Zed, *Somewhere in the Jungle.....* (1997)

kegiatan Infiltrasi dan sabotase tetap berjalan ke dalam kota yang diorganisir oleh kelompok-kelompok gerakan bawah tanah. Kelompok ini berafiliasi pada kebijakan formal pemerintah kota. Afiliasi gerakan bawah tanah di dalam kota dimungkinkan ketika Belanda mendirikan Hood tijdelijke bestuur (kepala pemerintahan sementara) sejak bulan September 1947. Penguasaan Belanda di Kota Padang kembali menghidupkan lembaga Gemeente (depan kota praja) gaya kolonial sebelum perang. Anggota Gemeente raad (kota praja) terdiri dari 17 orang, semuanya diangkat (di antaranya 7 orang Indonesia, 5 orang Belanda, dan 5 orang timur asing) dewan itu dan kemudian memilih Dr. Abdul Hakim, mantan walikota Padang yang pertama sebagai Burgemeester (walikota) Padang di bawah kekuasaan Belanda.

### **Penyerahan Kedaulatan**

Akibat serang sporadis Belanda pada agresi Belanda kedua, timbul tekanan yang semakin gencar dari dunia Internasional dan juga PBB serta kesulitan-kesulitan militer yang dialami Belanda di Jawa dan Sumatera, sehingga memaksa Belanda untuk memulai perundingan kembali dengan pihak Republik<sup>63</sup>. Pada bulan Januari 1949 perundingan baru kembali dimulai antara kedua belah pihak, dan perundingan ini berhasil mencapai kesepakatan yang di kenal dengan "Roem Royen".

Pada tanggal 3 Agustus 1949 pemerintah Republik mengumumkan gencatan senjata secara resmi, yang baru diberlakukan setelah tanggal 11 Agustus untuk daerah Jawa, dan sejak tanggal 15 Agustus untuk Sumatera. Sementara pada saat yang bersamaan Belanda segera mempersiapkan serah terima kekuasaan kepada pemerintahan Republik. Persiapan-persiapan lebih lanjut segera dilakukan pada akhir bulan Agustus 1949, dengan membentuk Dewan Pusat Bersama (Central Joint Board) untuk tingkat pusat, dan komite Lokal Bersama (Local Joint Board) pada tingkat daerah, termasuk Sumatera Barat.

---

<sup>63</sup> Bagaimanapun, agresi militer Belanda kedua terhadap Republik telah menimbulkan sikap antipasti banyak Negara, dua di antaranya yang bersikap paling keras adalah India dan Australia.

Dalam suatu rapat istimewa yang diadakan di Padang antara Kolonel Van Erp, peserta delegasi Belanda, dengan Gubernur Militer M. Nasroen pada tanggal 12 November 1949, pihak Republik mengusulkan supaya sebelum tentara Belanda ditarik dari daerah Republik, terlebih dahulu wakil-wakil Republik dapat masuk kota. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan di dalam pemerintahan. Berdasarkan keputusan bersama (Indonesia-Belanda), kota-kota besar di Sumatera Barat akan diserahkan oleh Belanda kepada pejabat pemerintah yang telah ditunjuk untuk tugas itu.

pada tanggal 27 Desember 1949 Kota Padang diserahkan dari Residen Straten kepada Gubernur Militer Sumatera Tengah Mr. M. Nasroen. Sejak itu Padang langsung berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS). Pengembalian Kota Padang ke pihak Republik menimbulkan Shock di kalangan orang-orang yang selama ini bekerjasama dengan Belanda, karena cemas dan takut akan tindakan balas dendam dari penduduk dan para pejuang. Namun ketidakpastian nasib mereka mulai terobati ketika Syafrudin sebagai wakil pemerintahan Sumatera Barat mengajak semua kalangan untuk tidak melakukan aksi balas dendam kepada orang-orang yang selama ini diduga bekerjasama dengan Belanda<sup>64</sup>.

## **B. keadaan Geografis Kota Padang (Sebelum Perluasan Kota)**

Kota Padang merupakan salah satu daerah tingkat II di propinsi Sumatera Barat yang terletak di tepi pantai pulau Sumatera, dari segi geografis terletak antara 56 lintang Selatan dan 21 bujur Timur, dengan ketinggian lebih kurang 100 meter dari permukaan laut, akan tetapi ada sebagian dari wilayah Kota Padang yang berbukit-bukit dengan ketinggian lebih kurang 300 meter dari permukaan laut. Kedudukan Kota Padang sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dengan teluk Bayur yang merupakan pelabuhan terbesar di pantai barat Indonesia. Kodisi letaknya yang

---

<sup>64</sup> Mestika Zed dkk., *Sej.. Op. cit.*, Hal 313

demikian itu merupakan faktor pendorong bagi pertumbuhan perdagangan baik antar daerah maupun luar negeri. Kotamadya Padang yang luasnya 33 Km persegi dibagi dalam 3 kecamatan yaitu kecamatan Padang barat, Padang timur, dan Padang selatan. Distribusi luas masing-masing kecamatan dapat disajikan pada tabel 1 dibawah ini ;

**Tabel 1 ; Luas daerah kotamadya Padang sebelum perluasan**

NO	Kecamatan / kampung	Luas
<b>1</b>	<b>Padang Barat</b>	<b>13 Km</b>
a	Ulak Karang	6 Km
b	Belakang Tangsi	3 Km
c	Kampung Jawa	3 Km
d	Pondok	1 Km
<b>2</b>	<b>Padang Timur</b>	<b>10 Km</b>
a	Alai Gunung Panggilun	2 Km
b	Sawahen	3 Km
c	Parak Gadang	1 Km
d	Andalas Marapalam	4 Km
<b>3</b>	<b>Padang Selatan</b>	<b>10 Km</b>
a	Alang Lawas	1 Km
b	Pasar Gadang	1 Km
c	Teluk Bayur	1 Km
d	Seberang Padang	3 Km
e	Air Manis	4 Km

**Sumber data ; Padang Statistik**

Dari tabel 1 terlihat kecamatan Padang barat merupakan kecamatan terluas yaitu 13 Km persegi selanjutnya Padang timur, dan Padang selatan yang memiliki luas yang sama yaitu 10 Km persegi. Secara administratif kota madya Padang memiliki batas wilayah sebagai berikut ;<sup>65</sup>

- Utara berbatasan dengan Koto Tangah, yang meliputi nagari Kasang, Koto Tangah, dan Nanggalo.
- Selatan berbatasan dengan Lubuk Begalung, yang meliputi nagari Nan XX, Lubuk Kilangan, Bungus, dan Teluk Kabung.
- Timur berbatasan dengan Pauh, yang meliputi nagari Pauh V, Pauh IX, dan Limau Manis.

Tiga daerah ini nantinya dalam perjuangan kemerdekaan nantinya dikenal dengan Padang luar kota, yang menjadi basis perlawanan terhadap kedudukan Belanda di Kota Padang.

Kota Padang merupakan daerah yang terdiri dari daratan pantai dan bukit-bukit serta pulau kecil. Daerah ini mempunyai panjang pantai 19.800 M (termasuk Pulau Pisang), dan diairi beberapa sungai yaitu batang Arau, Batang Kuranji, dan Bandar Bakali, sungai-sungai tersebut bermuara di Samudera Hindia. Sungai Batang Arau yang mengalir dari timur ke barat terletak antara daratan rendah dengan daerah perbukitan yang secara fisik membagi Kota Padang menjadi dua bagian yaitu<sup>66</sup> ;

1. Daerah yang berada di sebelah utara Batang Arau yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 5 Meter di atas permukaan laut, yang tanahnya makin ke timur makin naik dengan kemiringan yang tidak terlalu besar
2. Wilayah yang berada di sebelah Selatan Batang Arau merupakan daerah perbukitan dengan tinggi pinggang rata-rata 300 Meter di atas permukaan laut.

---

<sup>65</sup> Kotamadya Padang 1972, (Pemerintah Daerah Kota madya Padang 1973) hal 9

<sup>66</sup> *Ibid*

Dilihat dari temperatur Kota Padang dapat dikatakan cukup panas dengan keadaan temperatur udara umumnya berkisar 28,5 – 31,5 C pada siang hari, dan 24 – 23,5 pada malam hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus – Februari dengan curah hujan rata-rata 306 Mm pertahun.

### C. Kedudukan Perempuan Minangkabau

Untuk memahami realitas sekarang kita tidak bisa melepaskan dengan masa lampau, sebab sejarah menurut Romein seperti yang dikutip oleh Mestika Zed, adalah “masa lampau yang tak pernah selesai”.<sup>67</sup> Secara implisit tiga dimensi waktu dalam sejarah ; masa lampau, masa kini, dan masa depan mempunyai keterkaitan satu sama lain, sehingga tepat bila ada pepatah yang mengatakan “dalam masa kini tersimpan masa lampau dan masa depan terdapat pada masa kini”.<sup>68</sup> Oleh karena itu, sebelum melihat peran perempuan pada masa perjuangan di Kota Padang, khususnya organisasi KRI, ada baiknya melihat dulu kedudukan perempuan dalam tradisi, adat, dan kebudayaan Minangkabau.

Di satu sisi secara filosofis Minangkabau menganut sistem matrilineal, sistem yang mengatur bahwasanya garis keturunan, harta pusaka, dan perempuanlah pemilik otoritas suku atau keluarga. Perempuan memiliki hak mendasar untuk mengontrol dan mempunyai otoritas moral dalam mengambil keputusan<sup>69</sup>. Figur perempuan dalam kekerabatan sebagai limpapeh rumah nan gadang, umbun puro pegangan kunci, pusek jalo kumpalan tali, kaunduang-unduang ka Madinah, kapayuang panji ka sarugo, semakin memperkuat perempuan Minangkabau menjadi perempuan yang aktif, penuh inisiatif dan menjadi teladan dalam kampung. Artinya secara sosial dan budaya terlindungi oleh sistem

---

<sup>67</sup> Mestika Zed., 1984., *Pengantar Studi Historiografi.*, (Padang ; Unand) Hal 22

<sup>68</sup> Sartono Kartodirjo., 1992., *Pendekatan Ilmi Sosial Dalam Metodologi Sejarah.*, (Jakarta ; PT Gramedia) Hal 33

<sup>69</sup> Abel Tasman, Nita Idrawati, satri., 2002., *Siti Manggopoh.*, (Padang ; Yayasan Citra Budaya Indonesia) Hal 17

matrilinealnya. Secara budaya mempunyai posisi yang tinggi dan terhormat dalam keluarga, dan secara ekonomi memperoleh hak atas rumah, sawah ladang serta sumber-sumber ekonomi lainnya. Selain itu perempuan Minangkabau juga diakui mempunyai hak politik. Karena perempuan diakui mempunyai kedudukan sebagai nan gadang basa batuah, kok hiduik tampek banasa, kok mati tampek baniek<sup>70</sup>.

Kekuasaan perempuan dijalankan oleh saudaranya yang laki-laki atau disebut ninik-mamak. Di sinilah muncul keunikan yang terkesan adanya dualisme kultural, perempuan dianggap sebagai pemilik tapi seperti tidak berkuasa dalam mengoporasikan hak kepemilikannya. Apa yang menjadi filosofi terkesan berbeda dengan apa yang terjadi dalam prakteknya. Dalam hal kepemimpinan yang berhak menjalankan adalah laki-laki, perempuan tidak bisa menjadi penghulu, tapi perempuan berhak mengawasi atau memberikan pendapatnya dalam hal di mana seorang penghulu (pemimpin) mengambil kebijaksanaan atau membuat keputusan. Perempuan juga menjadi penerima warisan yang seterusnya nanti juga akan diwariskan pada anak keturunannya yang perempuan. Sementara laki-laki berkewajiban manggarap atau mengelola harta warisan tersebut namun hasilnya tetap menjadi hak saudaranya yang perempuan. Dalam banyak kajian tentang perempuan Minangkabau, sebagian orang berpendapat bahwa perempuan memiliki kekuasaan tapi tidak berhak untuk memerintah.

Namun dalam tulisan Muchtar Naim tentang Bundo Kanduang, ia memberikan penilaian yang sangat tinggi tentang Bundo Kanduang sebagai orang yang sangat berkuasa. Tidak hanya berkuasa karena sistem sosial yang matrilineal, tetapi juga punya kekuasaan untuk memerintah, terutama terhadap anak-anaknya. Perempuan di Minangkabau diposisikan sebagai perempuan senior atau sebagai ibu yang kekuasaannya sangat vital dan mempunyai pengaruh politik yang cukup penting.

Pandangan yang memiliki penilaian yang bertentangan tentang perempuan Minangkabau yang kadang-kadang cenderung membatasi kedudukan dan gerak perempuan adalah pandangan yang tidak

---

<sup>70</sup> Purnawati, Linda., Harian Singgalang 5 Juni 2008

relevan dengan konsepsi perempuan Minangkabau sendiri. Jadi pandangan yang menyatakan bahwa perempuan tidak memiliki kekuasaan dan berpengaruh secara sosial politik, adalah penilaian yang sangat lemah dan sangat meragukan.

Penilaian yang memunculkan dualisme terhadap posisi perempuan Minangkabau, biasanya didapatkan dari penilaian yang tidak secara sungguh-sungguh mendapatkan pijakan dari fakta-fakta tentang perempuan Minangkabau itu sendiri, tetapi penilaian tersebut lebih cenderung berangkat dari kontruksi teoritis orientalis Barat atau dari pandangan lain yang berasal dari luar Minangkabau.

Sebagaimana dikatakan Ranny Emalia, meskipun laki-laki diberikan kepercayaan sebagai pemimpin politik dalam komunitas nagari, tapi sistem politik Minangkabau tidaklah bersifat patrialistik, tidak berdasarkan fondasi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Susunan tidak didasarkan pada persoalan gender, tetapi lebih karena kemampuan dan pengalaman menyiapkan lingkungan serta pengawasan terhadap kerusakan kultural dan material terhadap kelompok atau komunitas yang diwakilkannya<sup>71</sup>.

Berdasarkan pada kenyataan ini, perempuan mempunyai kelenturan dalam menempatkan posisinya dalam struktur masyarakat, perempuan mempunyai kelonggaran dalam memilih kedudukannya. Jadi terbentuklah kepemimpinan termasuk kepemimpinan politik lebih berdasarkan pada kualifikasi kemampuan, bukan karena diskriminasi kelamin terhadap perempuan yang dengan pemahaman yang cenderung dipandang lemah. Jika seorang perempuan memiliki kecukupan material, kecakapan intelektual, dan bobot spiritual, ia bisa saja menggunakan pengaruh dan perannya secara efektif.

---

<sup>71</sup> Abel Tasman dkk., *op.cit.* Hal 18-19

Namun dalam sejarah Minangkabau sendiri terwujud konsepsi filosofis yang ideal tentang perempuan Minangkabau, jarang sekali bisa terwujud dalam kenyataan. Yang ideal tetaplah sekedar ideal, namun lain dengan kenyataan aktual. Yang lebih sering terlihat dalam praktek sejarahnya, perempuan tetap saja sekedar menjadi makhluk yang terkukung oleh pandangan patriarkis yang lebih mengedepankan laki-laki sebagai penentu banyak aspek kehidupan.

Akan tetapi dalam berbagai peristiwa sejarah pula kita banyak menemukan adanya kaum perempuan yang keluar dari kondisi yang mengukung dan mendekap hak-hak tersebut. Banyak tokoh perempuan yang bisa disebut, mereka menjadi figur yang membanggakan bagi lingkungan masyarakatnya, bangsanya, bagi kaum perempuan sendiri, dan bahkan bagi kaum laki-laki sendiri<sup>72</sup>. Hal ini dapat dilihat dari lahirnya tokoh-tokoh perempuan ditengah-tengah masyarakat Minangkabau yang sudah ada seperti Siti Manggopoh, Rohana Kudus, HR. Rasuna Said, Rahmah El Yunussiah, dan lain-lain.

#### **E. Peranan berbagai kelompok sosial dalam perjuangan**

Dalam perjuangan, ada beberapa faktor yang mendorong semangat juang masyarakat yang diantaranya faktor geografis, pengalaman, historis masyarakat, agama, struktur masyarakat, maupun psikologi masyarakatnya, yang telah mendorong kesadaran kolektif untuk ikut serta dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan<sup>73</sup>. Dalam peranan kolektif tersebut menurut G. Karsapoetra dan RG. Widyaningsih<sup>74</sup>, adanya kelas-kelas sosial agar antara mereka dapat hidup bekerjasama tanpa pertentangan, di mana kelas yang kuat membantu kelas yang lemah begitu juga sebaliknya, karena masing-masing saling membutuhkan sehingga mewujudkan suatu keharmonisan dalam masyarakat.

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, Hal 20

<sup>73</sup> Hotman M. Siahaan, 1993., *Pengantar Ke arah Sejarah dan Teori Sosiologi.*, (Jakarta :Bina Aksara.)  
Hal 144

<sup>74</sup> G. Karsapoetra dan RG. Widyaningsih., 1982., *Teori Soaiologi.*, Bandung : Armico. Hal 109

Sejalan dengan pendapat tersebut, maka untuk melihat perjuangan ini maka tidak akan terlepas dari peranan berbagai kelompok sosial yang ada dan saling membantu dalam mempertahankan kemerdekaan. Dalam adat Minangkabau dan sejarah perjuangannya, selain peranan dari kaum perempuan seperti yang diteliti, maka akan dikenal juga peranan dari kelompok lain seperti Ninik Mamak, Alim Ulama, Kaum Cerdik Pandai, pemuda, dan anak-anak (tentara semut) ;

### 1) Peran Ninik Mamak

Ninik mamak merupakan salah satu unsur dari “Tengku tigo Sajarangan”, di mana sebagai pemuka masyarakat di Minangkabau. Golongan dan kelompok masyarakat Minangkabau mempunyai pimpinan yang berada ditangan ninik mamak, sedangkan pengertian dari ninik mamak mengacu pada “mamak pemangku adat” yang mempunyai jabatan tertentu dalam adat<sup>75</sup>. Eksistensi (keberadaan) seorang ninik mamak dalam masyarakat adalah ibarat “baringin ditengah Padang, ureknyo tampek baselo, dahannyo tampek bagantuang, daunnyo tampek baliduang, batangnyo tampek basanda”. Maksudnya, sebagai seorang pemimpin, ninik mamak harus memelihara keselamatan dan kesejahteraan warganya sesuai dengan hukum dan kelaziman, atau kebiasaan. Peran ninik mamak dalam masyarakat cukup penting dan luas, seperti terungkap dalam pantun dibawah ini ;

*Kaluak paku kacang balimbiang*

*Tampuruang lengang-lengangkan*

*Bao manurun ka saruaso*

*Tanam siriah jo ureknyo*

*Anak dipangku kamanakan dibimbiang*

*Orang kampuang dipatengangkan*

---

<sup>75</sup> A.A Navis, 1984., *Alam Takambang Jadi Guru ; adat dan kebudayaan Minangkabau.*, (Jakarta : Pt. Grafiti Press) hal 130

*Tenggang nagari jan binaso*

*Tenggang sarato jo adiak nyo*<sup>76</sup>

Melihat pentingnya keberadaan dan peranan ninik mamak dalam masyarakat Minangkabau, maka pada masa perang kemerdekaan para ninik mamak tampil menunjukkan peran dan aktifitasnya dalam membela tanah air. Hal ini terlihat misalnya dengan duduknya wakil pemuka adat (ninik mamak) dan struktur pemerintah dan lembaga atau wadah perjuangan yang tumbuh dan berkembang pada awal kemerdekaan, seperti duduknya Orang Kayo Ganto Suaro, mewakili golongan adat dalam badan eksekutif KNI (Komite Nasional Indonesia) Sumatera Barat<sup>77</sup>. Kemudian untuk perjuangan digaris depan para ninik mamak membentuk sebuah barisan yaitu barisan Hulu Balang, sedangkan digaris belakang para ninik mamak juga aktif berjuang seperti dalam menghidupkan dapur umum, serta menggerakkan anak kemenakan untuk berpartisipasi secara aktif dalam perjuangan yang nanti dikenal dengan tentara semut.

## 2) Peran Alim Ulama

Alim ulama sebagai salah satu kelompok sosial dan termasuk bahagian dari “Tengku Tigo Sajaringan” yaitu sebagai pemuka masyarakat di Minangkabau yang mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Perannya itu disebut sebagai “*Suluh Bendang di Nagari*” yang artinya para ulama mempunyai misi penyuluhan atau penerangan terhadap masyarakat mengenai mana yang baik dan mana yang buruk yang bersumber dari ajaran Islam.

Dengan pentingnya keberadaan dan peranan para ulama ditengah-tengah masyarakat Minangkabau, maka pada masa perang kemerdekaan para ulama tampil menyuarakan persatuan

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal 234

<sup>77</sup> Ahmad Husein dkk., *Op.cit.*, hal 118

dan perjuangan membela tanah air. Keluarnya fatwa ulama sebagai hasil kongres MIT pada awal kemerdekaan, bahwa perjuangan menentang Belanda adalah fardu 'ain hukumnya, dan orang yang mati dalam perjuangan itu adalah mati syahid<sup>78</sup>, merupakan salah satu contoh kongkrit tentang kepedulian dan peranan ulama dalam membela kemerdekaan. Di samping itu untuk perjuangan digaris depan, para ulama juga ikut membentuk barisan perjuangan serta berjuang dalam barisan tersebut, seperti Sulaiman Arrasuli sebagai salah satu ulama terkemuka di Sumatera Barat dalam pembentukan LASMI.

### 3) Kaum Cerdik Pandai

Guru-guru dan orang-orang berpendidikan dalam masyarakat Minangkabau biasanya disebut orang cerdik pandai. Mereka mempunyai pengetahuan dan pandangan yang luas serta mampu memecahkan persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Orang cerdik pandai adalah *orang yang terpelajar, mereka arif dan bijaksana, tahu jo ereng dengan gendeng, tahu jo singka ka manyambah, dan tahu jo ujuang kato sampai, serta mempunyai wawasan yang luas*. Kaum cerdik pandai ini selanjutnya dikenal juga "Cendikiawan".

Sebagai salah satu unsur dari pemuka masyarakat di Minangkabau, kaum cendikiawan ini mempunyai status dan peranan yang penting dalam masyarakat. Peranannya itu misalnya terlibat dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat serta dalam menyusun rencana-rencana pembangunan masyarakat. Begitu pentingnya kemerdekaan dan cerdik pandai dalam masyarakat Minangkabau, maka pemerintah saat pendudukan Jepang mengangkat wakil kaum cendikiawan itu sebagai penasehatnya yaitu salah satunya dengan mengangkat Chatib

---

<sup>78</sup> Edwar (eds)., 1981., *Riwayat hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar.*, Padang ; Islamic Center. Hal 62

Sulaiman (seorang cendikiawan Minang) sebagai wakil ketua Dewan Penasehat Propinsi (Shu Sangikai) yang dibentuk pada bulan November 1943<sup>79</sup>.

Kemudian setelah Indonesia merdeka, para cendikiawan pun tampil menghadapi gejala revolusi dengan menyusun kekuatan serta membina persatuan dan kesatuan masyarakat dalam menghadapi penjajah. Chatib Sulaiman yang disebut di atas dalam rapat pleno KNI, pada permulaan Oktober 1945 terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif Sumatera Barat yang mewakili kaum cerdik pandai<sup>80</sup>. Sebagai seorang cendikiawan, Chatib Sulaiman mempunyai pandangan yang jauh ke depan serta mempunyai kemampuan dalam menyusun rencana serta konsep-konsep penting dalam menghadapi situasi yang tengah dihadapi Negara Indonesia pada umumnya dan Sumatera Barat khususnya. Salah satu konsep pemikirannya yang sangat berharga dalam menghadapi Belanda pada masa revolusi adalah tentang perlawanan rakyat semesta, yaitu dengan membentuk BPNK (Badan Pertahanan Negara dan Kota), di mana Chatib Sulaiman sendiri terpilih sebagai ketua BPNK se Sumatera Barat. Selain itu, Sumatera Barat juga memiliki tokoh cendikiaan seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahril, Tan Malaka, dan lain-lain yang pemikirannya telah mewarnai kancah Nasional dan bahkan Internasional.

#### 4. Pemuda

Keberadaan pemuda (Urang mudo) dalam masyarakat Minangkabau adalah sangat penting, terutama dalam masalah keamanan. Peranan mereka disebut sebagai "*Parik paga nagari*" (parit pagar negeri). Artinya seorang pemuda mempunyai tanggung jawab yang besar dalam menjaga keamanan masyarakat. Hal ini disebabkan karena secara fisik pemuda mempunyai

---

<sup>79</sup> Audrey R. Kahin., 1990., *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan.*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. Hal 154

<sup>80</sup> Ahmad Husein dkk., *Op.cit.*, hal 118

kekuatan yang dapat diandalkan dan secara emosional pemuda memiliki semangat yang luas dalam menghadapi sesuatu.

Pada masa perang kemerdekaan para pemuda tampil menunjukkan peranannya dalam membela kemerdekaan. Berdirinya wadah atau organisasi yang menyuarakan kemerdekaan yang memakai kata pemuda pada awal kemerdekaan seperti BPPI (Badan Penerangan Pemuda Indonesia) di Bukit tinggi menunjukkan betapa pentingnya peranan pemuda dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Selain itu pemuda juga banyak ikut bergabung pada BKR, TRI, dan organisasi lasykar lainnya seperti Hizbullah, Harimau Kuranji, yang nantinya menjadi barisan pertahanan terdepan Kota Padang ini.

## 5. Perempuan

Kaum perempuan juga menunjukkan peranan yang penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yang di antaranya bahkan ada yang menjadi pemimpin serta tokoh penggerak rakyat dalam perjuangan. Tokoh-tokoh perempuan Sumatera Barat tidak saja bergerak dalam bidang kewanitaan, tetapi mereka akhirnya memperlihatkan sepak terjang yang sangat menakutkan pemerintahan Belanda saat itu. Seperti Rahmah El Yunusiah misalnya orang yang pertama mengibarkan bendera merah putih di Padang Panjang tanggal 2 Oktober 1945, dan mempelopori pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang kemudian menjadi inti dari pada Batalion Merapi, serta menjamin seluruh Perbekalan Batalion Merapi<sup>81</sup> dan juga Srikandi Sitti yang telah memperlihatkan keberaniannya dalam perang Manggopoh, di mana tokoh-tokoh perempuan

---

<sup>81</sup> Konawi., 1986., *Sejarah Setengah Abad Persatuan Pergerakan Indonesia.*, Jakarta ; Balai Pustaka., hal 117

Minang di zaman pergerakan telah memperlihatkan keberaniannya tidak dengan senjata tetapi andil dalam menggelorakan semangat nasionalisme<sup>82</sup>.

Sesuai zaman itu, dalam perjuangan kemerdekaan semua komponen masyarakat ikut memberikan andilnya, demikian pula dengan kaum perempuan seperti tokoh-tokoh perempuan Permi Rasuna Said, Fatimah Hatta, Ratnasari, dan Rasimah Ismael yang telah tercatat namanya dalam sejarah, tidak saja berani memaki Belanda di atas podium, tapi juga menyediakan dirinya untuk di hukum<sup>83</sup>.

Di Kota Padang dan sekitarnya, para kaum perempuan juga menunjukkan partisipasi dan peranannya dalam perjuangan. Keikutsertaan perempuan dalam perjuangan itu dapat terlihat dengan berdirinya organisasi dan barisan perempuan seperti KRI, Hizbullah, Sabil Muslimat, dll. Di samping itu juga ada perempuan yang tidak menggabungkan dirinya dalam salah satu organisasi tapi secara spontan ikut memberikan andilnya dalam perjuangan. Untuk melihat sebagaimana andilnya peranan dari kaum perempuan ini (khususnya di Kota Padang), nanti akan dibahas pada Bab 3 tulisan ini.

## 6. Anak-anak (Tentara Semut)

Pada bahagian pendahuluan tulisan ini telah disebutkan bahwa usaha perang bukan usaha angkatan perang saja, tetapi telah merupakan usaha rakyat semesta diberbagai sektor kehidupannya, termasuk tentunya anak-anak atau tentara semut sebagai bagian dari kelompok sosial yang ada dalam masyarakat.

---

<sup>82</sup> *Sejarah Daerah Sumatera Barat.*, 1977., Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah., hal 87

<sup>83</sup> *Ibid.*,

Sebutan tentara semut pertama kali muncul pada saat pemuda pejuang atas kebijakan pemerintah yang diinstruksikan oleh Ismael Lengah dan pimpinan BPPI untuk membantu pengangkatan barang-barang milik tentara Sekutu di Teluk Bayur. Dalam kegiatan ini juga ikut serta anak-anak tanggung usia (berumur dibawah 17 tahun) yang pekerjaannya diawasi oleh mandor-mandor yang berasal dari pemuda pejuang yang umumnya pandai berbahasa Inggris atau Belanda. Di antara mandor waktu itu adalah Datuk Nurdin, Adam, Adjis Lakon, A Bakar, dan Anjang Lombok. Para mandor-mandor itulah yang memberi istilah tentara semut kepada remaja muda<sup>84</sup>. Umur mereka pada waktu itu berkisar 15 sampai 16 tahun.

Gejala awal partisipasi tentara semut dalam perjuangan adalah mengikuti kegiatan atau pergi bersama pemuda pejuang. Mereka belum terorganisir dalam bentuk kelompok-kelompok namun posisi mereka dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda pejuang (BKR) untuk kegiatan-kegiatan tertentu misalnya, untuk mengumpulkan peluru-peluru yang terdapat disekitar banjir kanal muara Padang, bahkan sebagian pemuda pejuang mengajak dan menyuruh anak-anak itu melakukan pencurian pada tempat-tempat yang dicantumkan. Sebagai contoh pada suatu kali Nuhud dan teman-teman sebayanya diajak dan disuruh mencuri makanan pada gudang makanan Jepang yang terletak di belakang SMA Don Bosko sekarang oleh anggota BKR<sup>85</sup>.

Sejalan dengan semakin panasnya situasi di Kota Padang, maka tokoh-tokoh pejuang baik dari BKR atau TKR maupun pemuka masyarakat marasa perlu memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam masyarakat termasuk anak-anak remaja tanggung usia untuk kepentingan perjuangan. Sementara sesama remaja muda itu sendiri juga telah terbina suatu solidaritas kelompok, maka terbentuklah kesatuan "tentara semut" yang tersebar diberbagai kampung di Padang dan sekitarnya. Pembentukannya yang berdasarkan inisiatif dari anggota remaja muda

---

<sup>84</sup> Nuhud, Ayub., 1986., *Kisah Perjuangan Remaja Muda 1945 (Pengabdian Tentara Semut)*. Hal 28

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal 30

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keputrian Republik Indonesia (KRI) merupakan organisasi perempuan pertama yang lahir di Kota Padang dan tidak terikat dalam suatu partai politik tertentu. Ide membentuk KRI ini berasal dari beberapa ibu-ibu yang sangat peduli terhadap perjuangan kemerdekaan serta didukung oleh bapak-bapak pejuang, dan dalam perkembangannya kedudukan KRI sendiri berada di bawah naungan TKR. Tujuan dari organisasi KRI adalah melatih peteri-puteri Indonesia agar tumbuh kesadaran bernegara. Kegiatannya antara lain membantu tentara membuat tanda pangkat dan menjahit baju, giat mengadakan latihan-latihan mengenai kepalangmerahan agar setiap saat dapat memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan, dapur umum, serta aktif dalam membantu tentara pejuang di garis depan seperti menjadi mata-mata atau kurir yang semuanya itu untuk membantu perjuangan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam perkembangannya, KRI nanti bergerak di dua tempat yaitu di Kota Padang dan Padang luar kota, akibat semakin panasnya situasi dalam kota saat itu. Setelah Belanda melakukan agresi militer pertamanya, markas dan anggota KRI akhirnya pergi mengungsi ke luar kota dan

melanjutkan perjuangan di Bukittinggi, karena Kota Padang saat itu yang sudah dikuasai oleh Belanda.

## **B. Saran**

Dari penulisan diatas tentunya menjadi cerminan untuk menggambarkan betapa penting, strategis, dan gigihnya kaum perempuan dalam perjuangan, khususnya di Kota Padang dan sekitarnya dalam mempertahankan Kemerdekaan. Menyadari bahwa mereka merupakan bagian kolektif lapisan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan, maka kaum perempuan juga memberikan andil yang tentunya sama sejajar dengan kaum pria.

Namun, hal ini menurut penulis berbanding terbalik dengan penulisan sejarah (khususnya di Sumatera Barat), di mana terjadi ketimpangan karena penulisan yang masih berpusat pada laki-laki. Nama-nama seperti Chatib Sulaiman, Ahmad Husein, Ismael Lengah, mungkin tidak asing lagi bagi kita dalam sejarah perjuangan daerah ini, tapi kenalkah kita atau anak-anak kita dengan nama-nama seperti Ratna Sari, Titi Aknam, Nurbaiti Diar Karim, Fatimah Hatta, dan srikandi-srikandi lainnya, yang juga ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan?. Hal ini tentu menjadi sangat ironis karena apalagi terjadi di negeri yang mengaku mewarisi sistem matrelineal ini. Meskipun kadang-kadang perempuan ditampilkan dalam sejarah, namun tidak lebih sebagai pelengkap, atau ranah yang dikonstruksikan dalam budaya patriakis yang memihak dan untuk kepentingan laki-laki, dan salah satunya terbukti dengan hanya berkisar 2 atau 3 halaman saja yang membahas tentang peran perempuan dalam buku-buku perjuangan khususnya di Sumatera Barat.

Oleh karena itu penulis harap agar hendaknya lebih banyak lagi penulisan yang mengangkat tentang sisi golongan terpinggirkan khususnya dalam masa perang kemerdekaan.

Bukan maksud untuk menciptakan penulisan sejarah yang Gynocentric (sejarah dengan perempuan sebagai pusat), tetapi sejarah yang lebih adil di mana baik kaum laki-laki maupun perempuan bersama mengambil bagian di dalamnya (sejarah androgynous).

Selain itu penulis menyadari penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan untuk menggambarkan peran perempuan khususnya organisasi KRI dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan khususnya di Kota Padang dan sekitarnya. Penulis berharap akan adanya penulisan-penulisan selanjutnya yang lebih mendalam, dan tulisan ini bisa dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk membantu penelitian dan penulisan selanjutnya.

## DAFTAR BACAAN

### **BUKU**

- A.A Navis, 1984., *Alam Takambang Jadi Guru ; adat dan kebudayaan Minangkabau.*, (Jakarta : Pt. Grafiti Press)
- Asnan, Gusti., 2006., *"Pemerintah Sumatera Barat dari VOC hingga Reformasi"*. Yogyakarta ;Citra Pustaka
- Ashari., 1995., *Singa Pasar Oesang dan Riwayat Front Utara.*, (Jakarta ; Booklet)
- Berry, David., 1982., *Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi.*, (Jakarta ; Rajawali)
- Edwar (eds)., 1981., *Riwayat hidup dan Perjuangan 20 Ulama Besar.*, Padang ; Islamic Center.
- Enar,Fatimah dkk. 1978. *Sumatra barat 1945-1949.* Padang ; Pemda
- G. Karsapoetra dan RG. Widyaningsih., 1982., *Teori Sosiologi.*, Bandung : Armico
- Louis Gottschalk.1986. *Mengerti Sejarah*, Terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta : UI Press.
- H.N Irna. 1980. *Seribu Wajah Wanita Pejuang Dalam Kancah Revolusi.* Jakarta. Syutingan.
- Hotman M. Siahaan, 1993., *Pengantar Ke arah Sejarah dan Teori Sosiologi.*, (Jakarta :)Bina Aksara.)
- Gandhi, Mahatma., 2002., *Kaum Perempuan dan Ketidakadilan Sosial.*, Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Ilyas Muslim. 1984. *Riwayat dan Perjuangan Aziz Chan.* Jakarta. Pt. Gunung Telaga
- Kahin, Audrey.1979.*Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950.* Angsana Mamanda.
- Kahin, Audrey., 2005., *Dari Pemberontakan ke Integrasi "Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998"*. Jakarta ; Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo.2003. *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta : Tiara Wacana
- Kumar, Ann. 2008. *Prajurid Perempuan Jawa"Kesaksian Ihwal Istanadan Politik Jawa akhir Abad ke 18"*. Jakarta ; Komunitas Bambu.
- Konawi., 1986., *Sejarah Setengah Abad Persatuan Pergerakan Indonesia.*, Jakarta ; Balai Pustaka.,
- Nugroho, Riant. 2008. *Gender dan Strategi Pengarus – Utamaya di Indonesia.* Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Nuhud, Ayub., 1986., *Kisah Perjuangan Remaja Muda 1945* (Pengabdian Tentara Semut).
- M. Rasyid, 1986., *Pandangan Terhadap Padang Kota Tercinta.*, Padang ; tidak terbit
- Mani P.R.S. 1989. *Jejak Revolusi 1945 "Sebuah Kesaksian Sejarah"*. Jakarta. Grafiti Pers.
- Maryetti dkk., 2000., *Peranan Kaum Wanita dalam Perjuangan Kemerdekaan di Front Timur Kota Padang Tahun 1945-1950.*, Depdikbud ; Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang
- Rasjid, Dahlan Ibrahim, dkk., 1978., *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau.*, Jakarta
- Ricklef, M.C., 2003., *Sejarah Indonesia Modern.*, Yogyakarta ; Gadhjah Mada University Pers.
- Rusli Amran., 1988., *Padang Riwayatmu Dulu.*, (Yosaguna)
- Saputra D. Sidik. 1991. *Revolusi Indonesia dan Hukum Internasional.* Jakarta: Universitas Indonesia.

- Sugiyanto., 2002., *Lembaga Sosial.*, (Yogyakarta : Global Pustaka Utama)
- Vreede, Cora. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia, Gerakan dan Pencapaian.* Jakarta ; Komunitas Bambu
- Yardat, Arif., 1979., *Sejarah Berdirinya dan Perjuangan Batalion Sabil Muslimat di Front Timur dan Front Utara Padang Area.*, Padang : tidak terbit
- Zed,Mestika, Edy Utama, Hasril Caniago. 1998. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1950.* Jakarta ; Pt. Penebar Swadaya.
- Zubir Zusneli dkk., 2000., *Perlawanan Masyarakat Padang Terhadap Sekutu (Oktober 1945-November 1946).*, Depdikbud ; Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Zed,Mestika. Emrizal Amri. dan Etmi Hardi. 2002. *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949) di Kota Padang dan Sekitarnya.* Padang;Yayasan citra budaya Indonesia.
- ..... .1978. *sejarah perjuangan kemerdekaan RI di Minang kabau 1945-1950 Jilid I.* Badan Pemurnian Sejarah Indonesia – Minang Kabau (B.P.S.I..M).
- ..... , 1979., *Sejarah Kemerdekaan Sumatera Utara (1945-1949).*, Departement Pendidikan dan Kebudayaan.

## Skripsi

- Warniati Juser (2002/37800). 2007. *Perundingan Tentang Utang Republik Pada KMB.*
- Amriman M., 1994 / 00131., *Kuranji pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945-1949.*
- Sulfa Rosi (2006)., *Peran Perempuan Pengusaha Industri Konfeksi dalam Mengatur Ekonomi Keluarga.*
- Jasmaneli (1993/08150)., *Profil Pejuang Pada Masa Revolusi Fisik di Indonesia.*

## Jurnal

- Fatimah,Siti. *Perspektif Jender dalam Historiografi Indonesia; pentingnya penulisan sejarah Androgenous.*
- ..... 2006. *Mengungkap Sisi Gelap Historiografi Indonesia ; Kekerasan terhadap perempuan dari tahun 1930-1960an.* LIPI
- ... .....101 *Kebangkitan nasional : Apakah perempuan punya Sejarah.* Opini
- ....., *Perspektif gender dalam historiografi Indonesia ; pentingnya penusan sejarah Androgenous.*
- Suryadi., *Perempuan Minang : Matrilineal yang “berlayar di arus deras”.*, Padang Ekspres selasa 25 November
- ....., *Sejarah harus ditulis ulang “dengan perspektif perempuan”.*, Kompas ; Senin 10 Desember 2001., hal 38
- Purnawati, Linda., *Perempuan Minangkabau.*, Harian Singgalang 5 Juni 2008.
- Rizal, JJ. *Jejak perempuan dalam Historiografi Indonesia.* Dalam Jurnal perempuan, no 52, tahun 2007, p 23